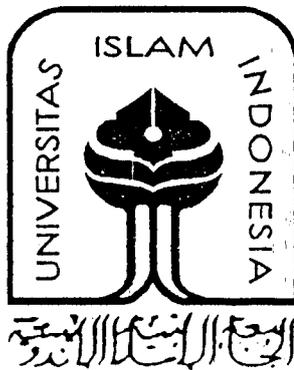


**PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH SLEMAN**

skripsi



Oleh :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH SLEMAN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

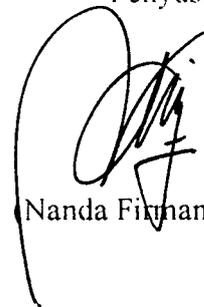
2005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Juli 2005

Penyusun,



(Nanda Firman Maulana)

PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH SLEMAN

Hasil Penelitian

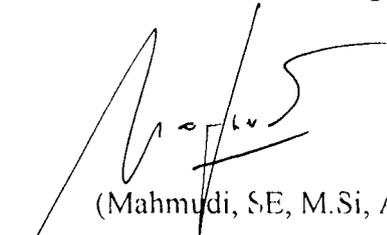
Diajukan oleh

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi

Yogyakarta, 25 Juli 2005

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing,



(Mahmudi, SE, M.Si, Ak)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

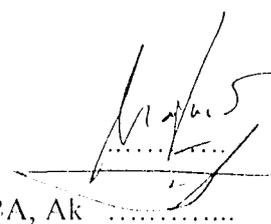
PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN

Disusun Oleh: **NANDA FIRMAN MAULANA**
Nomor mahasiswa: 00312059

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 16 Agustus 2005

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Mahmudi, M.Si. Ak

Penguji : Dr. M. Akhyar Adnan, MPA, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Suwarsono, MA

MOTTO

“Sebelum kedua telapak kaki seseorang menetap di hari kiamat akan ditanyakan tentang empat hal terlebih dahulu: Pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan, kedua tentang masa mudanya untuk apa dipergunakan, ketiga tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apakah dibelanjakan, dan keempat tentang ilmunya, apa saja yang ia amalkan dengan ilmunya itu.” (HR Bukhari-Muslim)

“Pelajarilah ilmu.

Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.

Menuntutnya, itu ibadah.

Mengulang-ngulangnya, itu tasbih.

Membahasnya, itu jihad.

Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu sedekah.

Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada tuhan.”

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ilya Al-Ghozali, 1986)

“Tingginya kualitas seseorang hanya bisa dinilai dengan

Banyaknya ilmu dan banyaknya permasalahan yang diselesaikan dalam hidupnya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK.....

Bapak dan ibuku, yang telah banyak berkorban untuk keberhasilan putra putrinya

Adikku, Dinda tersayang

Seluruh saudara, sahabat, HMI-MPO, karyawan, dosen, dan dekanat

di lingkungan UII yang selalu memberikan kritik konstruktif

agar lebih bijak dalam mengambil segala keputusan hidup

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Maha suci Allah dengan segala kesempurnaan-Nya. Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semakin tinggi kualitas hamba Allah hanya bisa diukur dari seberapa banyak ilmu dan cobaan yang diselesaikan dalam hidupnya. Semua elemen dalam kehidupan ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Semakin tinggi iman dan takwa seseorang maka semakin banyak cobaan akan menerpa, disinilah ilmu menjadi tetesan air hujan yang akan menyuburkan tanah gersang keimanan dan ketakwaan.

Tanpa pertolongan-Nya pekerjaan apapun tidak akan selesai, begitu pula skripsi ini yang berjudul "Persepsi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman" dan merupakan prasyarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Judul skripsi yang diangkat oleh penulis timbul dari kegelisahan penulis mengenai fenomena reformasi yang terjadi pada saat sekarang. Ketika masyarakat mulai menginginkan akuntabilitas kinerja pemerintah didaerahnya masing-masing, kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah daerahnya tidak terlepas dari diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah no.32 tahun 2004.

Penulis hanya membatasi pada akuntabilitas keuangan saja, karena hal tersebut yang secara materiil dan simpel dapat diukur sejauh mana akuntabilitas

keuangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman. Maka dari itu, dalam skripsi ini akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai persepsi publik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dengan selesainya skripsi ini dan dalam kesempatan ini pula, telah banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat kepada penulis baik secara moril atau materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/ibu dosen FE UII yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada saya
2. Bapak Drs. Suwarsono Muhammad, MA selaku Dekan FE UII beserta staff dan jajarannya yang mendorong saya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Mahmudi, SE, M.Si, Ak, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian, sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini
5. BAPPEDA, BPKKD, BAWASDA, DPRD Sleman, KPUD Sleman, IRE, IMPRESS, para akademisi akuntansi sektor publik di Jogja, Forum LSM, KADINDA Sleman dan para responden yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang saya berikan.

6. Kawan-kawan seperjuangan HMI-MPO se-Cabang Yogyakarta, yang mengajarkanku untuk siap menjadi pemimpin yang *visioner*, mempunyai *skill* dan *Islamic value* kapan pun dan dimana pun.
7. Partner kerja DPM FE UII, Riri dan Susi yang selalu membantu saya dalam kerja dan sebagai motivasi.
8. Kawan-kawan seluruh lembaga mahasiswa dan komunitas yang berada dalam lingkup FE UII, terutama kritik konstruktif yang selalu diberikan kepada saya agar saya lebih memahami siapa diri saya yang sebenarnya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak, ibu, adik dan keluarga sebagai motivator terbesar untuk maju dengan telah sabar dan doa menanti penulis menyelesaikan studi.

Akhir kata, tiada kesempurnaan kecuali kesempurnaan Allah SWT. Mudah-mudahan karya kecil yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jazza kumullah khairan katsiraa.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Juli 2005 M

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Berita Acara Ujian.....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata pengantar.....	vii
Daftar isi.....	x
Daftar tabel.....	xiv
Daftar lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	6
1.3. Batasan masalah.....	6
1.4. Tujuan penelitian.....	7
1.5. Manfaat penelitian.....	7
1.6. Hipotesis.....	8
1.7. Sistematika penulisan.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	11
2.2. Gambaran umum akuntabilitas.....	13
2.2.1. Pengertian dan fungsi akuntabilitas.....	13
2.2.2. Pentingnya akuntabilitas publik.....	16
2.2.3. Jenis-jenis akuntabilitas.....	18
2.3. Anggaran sektor publik (pemerintah).....	24
2.3.1. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik.....	25
2.3.2. Fungsi anggaran.....	26
2.3.3. Anggaran sebagai sarana akuntabilitas publik.....	28
2.4. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.....	30
2.4.1. Sistem akuntansi sebagai sarana akuntabilitas publik.....	30
2.4.2. Dasar kebutuhan akuntabilitas sistem akuntansi keuangan daerah.....	31
2.5. Laporan keuangan pemerintah daerah.....	32
2.5.1. Kerangka konseptual laporan keuangan pemerintah daerah.....	32
2.5.2. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah.....	33
2.5.3. Laporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas publik.....	36
2.6. Persepsi.....	37
2.7. Pengambilan keputusan.....	39
2.7.1. Pengertian dan tujuan pengambilan keputusan.....	39

	Halaman
2.7.2. Faktor-faktor pengambilan keputusan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Populasi dan sampel penelitian.....	43
3.2. Data penelitian.....	45
3.2.1. Data umum.....	45
3.2.2. Data spesifik.....	45
3.3. Metode pengumpulan data.....	46
3.3.1. Data primer.....	46
3.3.2. Data sekunder.....	46
3.4. Variabel penelitian.....	47
3.5. Metode analisis data.....	48
3.5.1. Pengujian hipotesis pertama (H_1).....	48
3.5.2. Pengujian hipotesis kedua (H_2).....	51
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. Pengujian validitas dan reliabilitas.....	54
4.2. Analisis deskriptif.....	59
4.3. Analisis kuantitatif.....	63
4.3.1. Analisis kuantitatif pada hipotesis pertama (H_1).....	63
4.3.2. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.....	68
4.3.2.1. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan.....	68

	Halaman
4.3.2.2. Akuntabilitas secara umum.....	69
4.3.2.3. Prinsip good governance secara umum.....	70
4.3.2.4. Penilaian persepsi berdasarkan Jenis kelamin.....	71
4.3.2.5. Penilaian persepsi berdasarkan pendidikan terakhir.....	73
4.3.2.6. Penilaian persepsi berdasarkan masa kerja.....	74
4.3.2.7. Penilaian persepsi berdasarkan institusi.....	76
4.3.2.8. Akumulasi penilaian persepsi publik.....	79
4.3.3. Analisis kuantitatif pada hipotesis kedua (H ₂).....	80
BAB V SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN.....	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran.....	87
5.3. Keterbatasan penelitian.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1.1. Hasil uji validitas dan reliabilitas butir akuntabilitas.....	56
4.1.2. Hasil uji validitas dan reliabilitas butir transparansi anggaran.....	56
4.1.3. Hasil uji validitas dan reliabilitas butir transparansi sistem.....	57
4.1.4. Hasil uji validitas dan reliabilitas butir transparansi laporan Keuangan.....	57
4.1.5. Hasil uji validitas dan reliabilitas butir signifikansi akuntabilitas dengan pengambilan keputusan.....	58
4.2.1. Jumlah responden menurut jenis kelamin.....	59
4.2.2. Jumlah responden menurut pendidikan terakhir.....	60
4.2.3. Jumlah responden menurut institusi.....	61
4.2.4. Jumlah responden menurut masa kerja.....	62
4.3.1.1. Akumulasi data persepsi.....	64
4.3.1.1. Hasil uji Friedman.....	66
4.3.1.2. Hasil perhitungan independent sample T tes.....	66
4.3.2.1. Persepsi publik terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.....	68
4.3.2.2. Persepsi publik terhadap akuntabilitas secara umum.....	69
4.3.2.3. Persepsi publik terhadap prinsip <i>good governance</i> secara umum.....	70

4.3.2.4. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan jenis kelamin.....	77
4.3.2.5. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan pendidikan terakhir.....	73
4.3.2.6. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan masa kerja.....	74
4.3.2.7. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan institusi.....	76
4.3.2.8. Akumulasi penilaian persepsi para pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.....	79
4.3.3.1. Hasil perhitungan regresi.....	83
4.3.3.2. Koefisien determinasi antara variable dependen dan independent.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner.....	92
2. Data nilai jawaban kuesioner.....	97
3. Analisis validitas dan reliabilitas.....	102
4. Analisis komparatif k sampel berkorelasi (perhitungan H1).....	107
5. Pengujian friedman (H_1).....	111
6. Analisis regresi linier berganda (perhitungan H_2).....	112
7. Pengujian koefisien regresi (H_2).....	116
8. Surat izin penelitian.....	117

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik. Hal ini dikarenakan secara definitif, kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) ditentukan oleh kedua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat masyarakat dan supremasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip mengenai *good governance* pun dalam penyelenggaraan negara tidak terlepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dikeluarkannya UU No.32 dan 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No.22 dan 25 Tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik agar publik dapat melihat dan menilai secara objektif.

Hal yang paling mendasar sekarang ini adalah perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Secara teoritis desentralisasi ini diharapkan akan

menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang notabene memiliki informasi yang paling lengkap. PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur rencana dan strategi pemerintah daerah. Demikian pula Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infra struktur sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik (Ulum, 2004).

Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan (pertanggungjawaban keuangan Daerah), dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 dalam Bab VI "Pertanggungjawaban Keuangan Daerah" maka secara tegas dalam pasal 37 dan pasal 38 PP tersebut dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu: Pasal 37 ayat (1) *Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD; ayat (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sekali setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.* Kemudian dalam Pasal 38, dikemukakan bahwa *Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri atas Laporan*

perhitungan APBD; Nota perhitungan APBD; Laporan Aliran Kas; dan Neraca Daerah. Sebelumnya pada bagian ketiga "Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah", dalam pasal 35 dikemukakan bahwa "Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku" (Situmorang, 2001).

Didalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi keuangan negara menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah terutama pengawasan dari masyarakat mengenai penggunaan dana masyarakat yang mereka gunakan. Akuntabilitas publik keuangan negara adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja keuangan negara kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened*) dapat terpenuhi (Marciasmo, 2004).

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam pernyataan konsep No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah

tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

...Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify of public resources and the purposes for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that a citizenry has a "rights to know," right to receive openly declared fact may can lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in a democratic society. (par.56)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja (Mardiasmo, 2004). Pernyataan konsep No.1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Ada lima dimensi akuntabilitas yang perlu dilakukan. Pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat (*sound practise*). Kedua, akuntabilitas manajerial atau kinerja (*performance accountability*). Pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Ketiga, akuntabilitas program. Lembaga-lembaga publik harus

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Keempat, akuntabilitas kebijakan. Pertanggungjawaban mengenai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Kelima, akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi (Mardiasmo, 2004).

Jika selama ini pemerintah mengklaim bahwa sudah melakukan yang namanya akuntabilitas terhadap masyarakat luas, sekarang bagaimana mengenai persepsi masyarakat sendiri terhadap kewajiban akuntabilitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain kontrol dari masyarakat adanya konsekuensi hukum pun menjadi cambuk atas pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan sehingga mendorong instansi pemerintah dalam memberikan laporan kinerjanya kepada masyarakat luas, karena walau bagaimanapun juga anggaran yang mereka gunakan seluruhnya dari kontribusi masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, setiap pemerintah daerah yang menyediakan akuntabilitas kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya.

Sehubungan dengan pentingnya mengenai penilaian masyarakat luas terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah maka peneliti dalam penelitiannya mencoba mengangkat judul **“Persepsi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman”**.

1.2. Rumusan Masalah

Secara garis besar masalah yang timbul dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas keuangan diterapkan oleh pemerintah daerah.
2. Ada atau tidak perbedaan persepsi antara para pengguna akuntabilitas keuangan pemerintah daerah terutama mengenai transparansi keuangan pemerintah daerah.

RPW

1.3. Batasan Masalah

1. Penelitian ini adalah melibatkan para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman di DIY, para pengguna tersebut terdiri dari:
 - a. Internal pemerintah kabupaten antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Institusi lain dibawah internal Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
 - b. Eksternal pemerintah kabupaten Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kabupaten Sleman, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sleman, Akademisi (bidang akuntansi sektor publik atau pemerintahan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Institusi lain

yang merupakan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Persepsi terhadap akuntabilitas dalam penelitian ini berdasarkan laporan akuntabilitas keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengambilan keputusan oleh masyarakat

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi berbagai elemen masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pengambilan keputusan oleh para *stakeholder* pemerintahan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Untuk pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan dapat menilai persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dan diharapkan juga dapat meningkatkan citra pemerintah Kabupaten Sleman yang baik di masyarakat.

2. Untuk para akademisi dan masyarakat sebagai pengguna serta pengamat diharapkan dapat mengetahui mengenai tingkat persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk mengetahui sejauh mana penilaian masyarakat di suatu daerah terhadap kinerja pemerintahnya serta menambah wawasan tentang persepsi dari berbagai kalangan masyarakat yang berbeda-beda dalam melakukan penilaian terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.
4. Bagi ilmu akuntansi sendiri diharapkan dapat dievaluasi lebih jauh agar terjadi perkembangan dalam konsep akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sehingga memunculkan hasil yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

1.6. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan, proporsi, kondisi atau dugaan sementara yang dianggap benar, agar dapat ditarik konsekuensi logis dan dengan cara iri kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya menggunakan data-data hasil penelitian.

Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 = Tidak terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

H_{a1} = Terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman

2. H_{o2} = Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara publikasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

H_{a2} = Terdapat pengaruh yang signifikan antara publikasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun dalam 5 tahap yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan hipotesis

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori normatif yang relevan dengan penelitian yang menjadi dasar pemecahan permasalahan yang dihadapi akuntabilitas pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan landasan metode penelitian yang merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian

yang mencakup spesifikasi populasi dan sampel, spesifikasi variabel serta alat analisis yang dipergunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan yang disebut juga analisis data dan pembahasan hasil analisis yang telah diuraikan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari seluruh bahasan penulisan, keterbatasan penelitian, implikasi hasil penelitian dan juga saran yang mungkin dapat disajikan serta dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Akuntabilitas publik termasuk salah satu faktor dalam mewujudkan pengelolaan yang baik atau *good governance*. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, Karim (2003) menguraikan prinsip-prinsip *good governance* satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.2. Gambaran Umum Akuntabilitas

2.2.1. Pengertian dan Fungsi Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah sangat kompleks. Dalam kondisi pemerintahan Indonesia yang mulai mengangkat masalah

pertanggungjawaban merupakan tindakan yang benar-benar diharapkan rakyat untuk dilakukan oleh pihak/badan yang telah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya milik negara, baik di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Gejala tersebut juga terjadi dalam dunia internasional.

Sebagaimana dikutip dalam modul Diklat BPKP 2002, *The oxford advance learner's dictionary (1987)* mendefinisikan akuntabilitas sebagai “*required or expected to give on explanation for one's action*”. Definisi diatas mengandung makna bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan utamanya di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi ataupun atasannya. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Tolok ukur atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui pengukuran seobjektif mungkin. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi juga mencakup praktik-praktik kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Singkatnya akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

J.B Ghartey (1987) mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan *stewardship* –apa, siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain: apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban

harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep *stewardship* ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karena itu harus diikuti dengan jiwa *interpreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara bagaimana untuk mencapai semua ini.

Ledvina V. Carino (1991) mengatakan bahwa *akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh tanggung jawab dan kewenangannya*. Dengan demikian setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja, akan tetapi membawa dampak yang signifikan terhadap orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungannya. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Jadi, dalam negara yang otokratik dan tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari publik.

Akuntabilitas secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban”. Ulum (1995) mengutip Patricia Douglas menguraikan fungsi akuntabilitas tersebut meliputi tiga unsur: *(1) Providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity; (2) Having the internal parties review the information, and (3) Taking corrective actions when necessary.*

Jadi suatu entitas (atau organisasi) yang akuntabel adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Melihat beberapa pengertian mengenai akuntabilitas di atas dapat berarti bahwa akuntabilitas dapat menjadi media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas yang tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

2.2.2. Pentingnya Akuntabilitas Publik

Akhir-akhir ini pemerintah memang kerap melaksanakan pembuatan produk hokum yang berkaitan dengan akuntabilitas publik. Hal tersebut tidak terlepas dari berlangsungnya agenda reformasi di Indonesia memberi keleluasaan daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa hal dilakukan pemerintah dalam mengelola dana masyarakat (Halim, 1999) yang pada akhirnya memunculkan akuntabilitas publik yang baik:

1. Ekonomis, mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya masukan (*input resources*) seminimal mungkin.
2. Efisiensi, mengukur sejauh mana pemerintah dapat mencapai keluaran optimal dengan sumber daya masukan seminimal mungkin (*output/input*).
3. Efektifitas, mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah jika dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat berupa peningkatan mutu pelayanan publik karena masyarakat akan merasa kepercayaan yang telah diamatkan kepada pemerintah, diantaranya:

1. Masyarakat dapat membandingkan kinerja keuangan actual dengan yang dianggarkan pemerintah yang secara tidak langsung ikut serta mengontrol pengelolaan dana pemerintah.
2. Masyarakat dapat menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
3. Masyarakat dapat membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bias menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

2.2.3. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Dalam pemahaman akuntabilitas, dikenal adanya akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal yang lebih dikenal dengan akuntabilitas publik. Pada akuntabilitas internal, bentuk dan jenis pertanggungjawaban yang ada akan menggambarkan hubungan vertikal dan horisontal. vertikal dalam artian hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan jajaran pemerintah daerah lainnya, sedangkan horisontal merupakan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat didaerahnya yang menggambarkan bentuk dan jenis pertanggungjawaban pada akuntabilitas publik. Jenis-jenis akuntabilitas yang dikutip dari modul pelatihan BPKP (2002):

1. Akuntabilitas Internal untuk Pelayanan Publik Pada Organisasi Sendiri
(*Internal Accountability to The Public Servant's Own Organization*)

Dalam akuntabilitas ini setiap hirarki organisasi petugas pelayanan publik diwajibkan untuk menunjukkan akuntabilitas kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu diperlukan komitmen

dari seluruh petugas untuk memenuhi criteria pengetahuan dan keahlian untuk pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut.

2. Akuntabilitas Eksternal untuk Individu dan Organisasi Pelayanan Publik di luar Organisasi Sendiri (*Eksternal Accountability to Individuals and Organization Outside Public Servant's Own Organization*)

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu, selain kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah dijanjikan/dipersyaratkan sebelum dia memangku jabatan tersebut.

Akuntabilitas eksternal baik didalam organisasi maupun diluar organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks ekuntabilitas. Banyak pihak yang membagi-bagi akuntabilitas ini menjadi beberapa bagian sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Pembagian akuntabilitas eksternal meliputi:

1. Menurut Mario D Yango (1991)

a. Akuntabilitas Tradisional atau Reguler (*Traditional atau Regularity Accountability*)

Memfokuskan perhatian pada transaksi-transaksi regular atau transaksi-transaksi fiskal dan untuk mendapatkan informasi

mengenai kepatuhan pada aturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan peraturan fiskal dan aturan pelaksanaan administrasi public. Disebut juga sebagai *compliance accountability*. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi public yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima.

b. Akuntabilitas Manajemen (*Management Accountability*)

Menitikberatkan kepada efisiensi dan penghematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pada saat yang bersamaan akuntabilitas ini menitikberatkan kepada peranan manajer atau pengawas dan mengharapkan agar pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang telah ada, tetapi juga untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan public yang terbaik. Efisiensi pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan suatu instansi pemerintah merupakan ciri utama akuntabilitas manajerial.

c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Memfokuskan pada pencapaian hasil operasi atas pelaksanaan program pemerintah. Untuk itu, pegawai pemerintah

harus dapat menjawab pertanyaan disekitar pencapaian tujuan pemerintah, bukan hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak dimana instansi akan dinilai kinerjanya bukan pelayanannya kepada semua pihak. Pencapaian tujuan tersebut tentunya dikaitkan dengan program-program instansi pemerintah tersebut yang dikaitkan dengan program nasional, sehingga keberhasilan instansi pemerintah ini mempunyai sumbangan yang jelas pada pencapaian program nasional.

d. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan social atas pelaksanaan kebijakan dan aktifitas-aktifitas organisasi. Untuk itu, perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya serta bagaimana dampaknya pada kondisi social. Hal inilah yang seringkali dilanggar oleh pemerintahan yang bersifat otokratik, dimana rakyat tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang nyata-nyata sudah merugikan mereka dari segi moril, materil, bahkan kadang jiwa.

2. Menurut Samuel Paul (1990)

a. Akuntabilitas Demokrasi (*Democratic Accountability*)

Merupakan gabungan antara *political* dan *administrative accountability*. Pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik yang telah memilih mereka. Pada negara-negara demokratis, menteri akuntabilitas pada parlemen. Penyelenggara pelayanan public yang akuntabilitas pada menteri/pimpinan instansi lainnya masing-masing. Jadi, pada dasarnya pelaksanaan akuntabilitas dilakukan secara berjenjang dari pimpinan tingkat bawah sampai ke jenjang yang paling atas (presiden) dan selanjutnya presiden melaksanakan akuntabilitas kepada MPR sebagai wujud pihak yang memberikan mandate dan telah memilihnya.

b. Akuntabilitas Profesional (*Professional Accountability*)

Dalam hal ini, para pakar professional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi oleh norma-norma dan standar profesinya sebagai perwujudan dari standar pelayanan mereka kepada masyarakat konsumennya. Mereka diperkenankan untuk menentukan *public interest* sesuai dengan norma-norma dan standar profesi tertentu. Kriteria akuntabilitasnya dipengaruhi oleh norma dan standar profesi masing-masing dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.

c. Akuntabilitas Legal (*Legal Accountability*)

Dalam akuntabilitas ini, pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan untuk kepentingan penyediaan *public goods* dan *public services* yang memang dituntut oleh seluruh masyarakat. Dengan akuntabilitas ini, petugas pelayanan public dapat dituntut di pengadilan apabila mereka gagal melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Mal praktek dan pelayanan seadanya kepada masyarakat ditunjukkan pada laporan akuntabilitas legal.

3. Pembagian Lainnya

a. Akuntabilitas Keuangan

Merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas ini pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya)

dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

c. Akuntabilitas Prosedural

Merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses.

2.3. Anggaran Sektor Publik (Pemerintah)

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Negara menurut John F. Due (1975) adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Suparmoko (2000) menyebutkan anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun.

Sedangkan menurut syamsi (1994) anggaran merupakan hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang pada jangka waktu tertentu. Dari ketiga pengertian mengenai anggaran pemerintah atau sektor publik tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

2.3.1. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgeter* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4. Nondiscretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodic, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.

8. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.3.2. Fungsi Anggaran

Menurut Ulum (2005) Anggaran Negara mempunyai beberapa fungsi seperti berikut ini:

1. Fungsi materiil

Fungsi ini menekankan bahwa anggaran berfungsi untuk membiayai tugas-tugas Negara di segala bidang selama satu tahun mendatang dan dilain pihak memuat jumlah-jumlah sumber pendapatan negara yang diperkirakan akan dapat diterima selama masa satu tahun yang akan datang.

2. Fungsi Kebijakan Pemerintah

Anggaran menggambarkan kebijakan yang akan dijalankan pemerintah untuk mas satu tahun mendatang.

3. Fungsi Hukum Tata Negara/Fungsi Otorisasi

Merupakan dokumen sebagai hasil penilaian perwakilan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, selanjutnya memberikan kuasa kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran dan menunjuk sumber-sumber pembiayaannya. Memberikan kuasa berarti memberikan otorisasi, diistilahkan juga sebagai fungsi otorisasi.

4. Fungsi Pengawasan

Anggaran mempunyai fungsi sebagai dasar pengawasan baik intern maupun ekstern. Secara intern dijalankan oleh penguasa yang bertanggung jawab ata penjagaan dan efisiensi anggaran dan kebijakan keuangan. Pengawasan secara ekstern sebaiknya dijalankan oleh badan yang kedudukannya diluar kekuasaan dan pengaruh pemerintah.

5. Fungsi Ekonomi Mikro

Anggaran negara menyediakan dasar bagi penilaian pelaksanaan kebijakan pemerintah dipandang dari sudut tepat guna ekonomi dalam rumah tangga negara.

6. Fungsi Ekonomi Makro

Anggaran negara memberikan gambaran tentang kebijakan sebagai rumah tangga negara yang bersumber dari pemerintah dan perwakilan rakyat. Hal ini terutama menyangkut perencanaan tingkat APBN yang dinilai memadai/pantas untuk tahun mendatang dengan menentukan jumlah belanja, jumlah pajak-pajak, dan pendapatan lainnya serta kemungkinan adanya kekurangan (defisit).

2.3.3. Anggaran Sebagai Sarana Akuntabilitas Publik

Sebagai *Stakeholder* daerah, masyarakat atau publik memang merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena anggaran daerah pada hakekatnya merupakan perwujudan amanat rakyat kepada eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otoritas wilayah yang dimilikinya. Dana yang terkumpul dalam anggaran pemerintah atau APBD merupakan dana masyarakat yang dikumpulkan oleh pemerintah atas berbagai jenis pungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran bahwa anggaran daerah sebagai amanat rakyat

menjadi sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan keuangan daerah

Anggaran pemerintah memperlihatkan kewenangan-kewenangan pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun propinsi, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, terlihat jelas pembagian urusan rumah tangga pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan undang-undang tersebut, tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin besar, sedangkan campur tangan atau intervensi pemerintah pusat menjadi semakin kecil. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu akuntabilitas anggaran yang menjelaskan kepada masyarakat mengenai perbedaan kewenangan pemerintahan tersebut karena:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif.
2. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004.
3. Sistem prosedur, format dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif.

2.4. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.1. Sistem Akuntansi Sebagai Sarana Akuntabilitas Publik

Reformasi yang terjadi beberapa tahun lalu telah menyebabkan perubahan beberapa sistem yang berhubungan dengan pemerintahan di Indonesia sebagai contoh pemilihan langsung presiden oleh rakyatnya yang sebelumnya hanya pemilihan melalui partai, reformasi juga sempat mengubah sistem akuntansi yang pada mulanya berbasis kas menjadi berbasis akrual. Perubahan sistem dan standar akuntansi pemerintahan memang suatu keharusan yang untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak demi terselenggaranya pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Perubahan tersebut dilakukan pemerintah pusat yang juga didukung oleh DPR, BPK serta para penyelenggara pemerintahan di daerah. Jadi, perubahan dalam sistem akuntansi pemerintah bukan semata-mata karena keinginan pemerintah dengan rezim pada saat itu tetapi keinginan berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas yang tinggi kepada publik.

Sistem akuntansi yang selama ini digunakan memang cukup sederhana dan mudah dipahami dan diimplementasikan. Namun dari kemudahan yang ada tersebut belum dapat dihasilkan laporan keuangan yang dapat menggambarkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana secara akurat dan wajar. Disamping itu, laporan realisasi anggaran dan alporan laporan arus kas tidak tersedia secara sistematis dan tidak tersedia informasi mengenai indicator kinerja untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan. Maka dengan sistem laporan keuangan yang baru ini, nantinya akan dapat diperoleh laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta perubahan ekuitas (Simanjuntak, 2004).

Disamping itu, dengan sistem yang baru ini juga dapat menghasilkan informasi tingkat pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja seperti masukan, keluaran, hasil dan manfaat. Keseluruhan dari hasil sistem akuntansi ini sudah cukup memenuhi kebutuhan akuntabilitas kepada publik.

2.4.2. Dasar Kebutuhan Akuntabilitas Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah 2 (dua) undang-undang yang berupaya mewujudkan sistem akuntansi yang cocok dengan kondisi pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralisasi dan hal tersebut membuat semakin kompleksnya sistem akuntansi keuangan pemerintah karena yang dibutuhkan disini adalah sistem akuntansi yang mampu menciptakan output yang dapat lengkap, akurat dan terpercaya agar akuntabilitas publik dapat terpenuhi dengan baik. Selain penjabaran undang-undang tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional pun telah dikeluarkan. Beberapa peraturan yang relevan disebut di sini adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan,

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.

2.5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.5.1. Kerangka Konseptual Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya semangat menuju perwujudan *Good Governance* di Indonesia telah menunjang munculnya pembuatan prosedur-prosedur, teknik, metode, dan standar Akuntansi yang sesuai dengan kondisi pemerintahan desentralisasi seperti sekarang ini. Berbagai upaya professional pun dilakukan oleh para ahli akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah *exposure draft* Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Daerah yang dipublikasikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah pada akhir Februari 2005.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan.
 - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan.
 - b. Sistem Pemerintahan otonomi dan transfer pendapat antar pemerintah.
 - c. Adanya pengaruh proses politik
 - d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian.
 - a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan public, target fiscal, dan sebagai alat pengendalian.
 - b. Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - c. Kemungkinan penggunaan Akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

2.5.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik kualitatif sebagai prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memnuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi tersebut harus memiliki:

2. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

3. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

4. Tepat waktu (*time lines*)

Informasi yang disajikan harus tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ada kontinuitas yang pasti sehingga berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

5. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

6. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi.

7. Penyajian jujur

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

8. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

9. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu sementara hal tersebut merugikan pihak lain.

10. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pemerintah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

pemerintah. Sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2002), yaitu:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.6. Persepsi

Persepsi secara etimologi berasal dari kata Inggris "*perception*" dan bahasa latin "*perceptio*", yang berarti menerima sedangkan pengertian persepsi secara terminologi adalah upaya memasukkan hal-hal kedalam kesadaran kita sehingga dengan demikian kita dapat meramalkan atau mengidentifikasikannya sebagai objek-objek di dunia luar. Secara umum, persepsi dianggap sebagai upaya menafsirkan dan mengadakan sintesis terhadap penerapan-penerapan atas suatu objek.

Menurut Boyd (1997) yang dikutip oleh Anindita (2001) persepsi dapat didefinisikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna.

Persepsi adalah bagaimana kita melihat dunia sekitar kita. Misal ada sebuah objek yang akan kita amati. Objek tersebut kita lihat kemudian kita mendapatkan stimulasi tentang objek tersebut. Berdasarkan objek itulah kita dapat memberikan gambaran mengenai objek tersebut.

Mengenai perbedaan persepsi antar individu, orang dapat muncul dengan persepsi yang berbeda terhadap objek rangsangan yang sama karena tiga proses yang berkenaan dengan persepsi (Stanton, 1981) yaitu:

1. Perhatian yang selektif (*Selective Exposure*)

Orang pada umumnya dihadapkan pada jumlah rangsangan yang sangat banyak setiap hari dan tidak semua rangsangan ini dapat diterima. Perhatian yang selektif berarti harus menarik perhatian masyarakat terhadap suatu objek misal perhatian terhadap laporan keuangan pemda, hal tersebut akan berarti menarik perhatian kita juga terhadap stakeholder yang melingkupinya misal DPRD, bidang-bidang atau departemen-departemen yang tercakup dalam laporan tersebut.

2. Gangguan yang Selektif (*Selective Distortion*)

Rangsangan yang diperhatikan oleh masyarakat pun tidak selalu seperti apa yang dimaksud. Setiap orang berusaha menyesuaikan informasi

yang masuk dalam pandangannya. Distorsi selektif menggambarkan kecenderungan orang menafsirkan suatu informasi dengan cara yang lebih mendukung daripada menentang konsepsi-konsepsi yang telah dimilikinya misal, pemerintah harus berupaya memahami susunan pikiran masyarakat terhadap suatu laporan keuangan agar dapat dipahami dengan mudah dan dampak serta interpretasi laporan keuangan tersebut diserahkan kembali kepada mereka sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi gangguan interpretasi yang menimbulkan perbedaan persepsi.

3. Mengingat kembali yang selektif (*Selective Reaction*)

Orang cenderung melupakan apa yang mereka pelajari dan memahami informasi yang mendukung sikap dan kepercayaan mereka. Mengingat yang selektif berarti mereka akan mengingat apa yang dikatakan orang lain yang menurutnya penting.

2.7. Pengambilan Keputusan

2.7.1. Pengertian dan Tujuan Pengambilan Keputusan

Keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu dari beberapa alternatif yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dihadapi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dalam unsur-unsur perencanaan terutama terhadap kesalahan maupun penyimpangan serius yang terjadi terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian, pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang atas alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang tepat.

Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan hambatan yang seminim mungkin. Walaupun dalam kenyataannya, keputusan yang diambil secara kontekstual dapat saja menimbulkan efek atau memunculkan masalah pada bidang yang lain. Maka dari itu para pengambil keputusan harus jeli dalam menganalisis suatu masalah dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat.

2.7.2 Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan

1. Kondisi internal dan eksternal organisasi

Ada beberapa factor utama untuk menilai kondisi internal organisasi, antara lain ketersediaan dana, kualitas sumber daya manusia, peralatan yang dimiliki, struktur organisasi, system informasi, dan lain-lain. Semua itu dapat menjadi kekuatan perusahaan untuk terus bertahan dan berkembang, atau dapat pula mejadi yang sebaliknya.

2. Ketersediaan informasi

Ketersediaan informasi menjadi factor yang sangat penting untuk menilai proses dan kualitas hasil keputusan yang diambil oleh manajemen. Dalam suatu organisasi, kualitas maupun kuantitas masalah yang harus

dipecahkan bervariasi, tetapi harus diselesaikan menurut urutan prioritasnya sehingga diperoleh hasil yang prima. Semua ini tergantung dari masukan informasi yang dimiliki. Makin sedikit dan makin tidak akurat input yang dipakai, makin besar resiko kesalahan terhadap keputusan yang dibuat.

3. Keterampilan pengambilan keputusan

Tipe pengambil keputusan yang dilatarbelakangi oleh pengkombinasian nilai-nilai dari faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya dapat terbagi atas lima tipe, antara lain:

- a. *Tipe Ketergantungan*, salah satu tipe pengambil keputusan yang kurang mempunyai pendirian tegas dan lemahnya penguasaan masalah yang dihadapi sehingga ia memerlukan bantuan orang lain.
- b. *Tipe Eksploitatif*, suatu pengambil keputusan yang ide-ide pengambilan keputusannya datang dari orang lain atau bawahannya dan sekaligus mengeksploitasi mereka untuk kepentingannya sendiri.
- c. *Tipe Tabungan*, pengambil keputusan mempunyai banyak ide tetapi ia pendam (tabung) untuk disampaikan pada saat yang dirasanya tepat demi kepentingan pribadinya, misal dalam rangka memperkuat posisi di suatu organisasi.
- d. *Tipe Pemasaran*, tipe ini dapat dikatakan tipe kebalikan dari tipe tabungan diatas. Tipe ini ditujukan kepada pengambil keputusan

Bab III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh elemen-elemen masyarakat di wilayah Yogyakarta yang menggunakan dan mengamati akuntabilitas keuangan pemerintah daerah khususnya kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dengan beberapa pertimbangan. Menurut Sekaran (2000) yang dikutip oleh Kuncoro (2003) bahwa yang disebut dengan *sampling* yaitu proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang mencukupi untuk mempelajari sampel dan memahami karakteristik elemen populasi.

Tidak semua sampel diambil secara random (acak). Menurut Djarwanto (2001) ada juga penelitian yang sampelnya diambil secara nonrandom karena beberapa alasan seperti: (1) individu yang populasinya mempunyai jumlah yang tidak terbatas atau bersifat tak terbatas (*infite*), (2) generalisasi bagi populasi bukan merupakan tujuan penelitian, (3) penarikan sampel secara random memerlukan biaya tinggi yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, (4) peneliti tidak mempunyai daftar lengkap individu populasinya.

Penelitian ini populasinya sangat banyak yaitu semua penduduk yang berada di wilayah DIY yaitu sebesar 940.649 jiwa (BPS Kab.Sleman), hal ini yang menyebabkan peneliti memutuskan untuk mengambil sampel tidak secara random tetapi disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Berkaitan dengan hal diatas maka peneliti mencoba membatasi sampel yang akan diambil tidak secara random yaitu

wilayah Yogyakarta yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten Sleman. Sampel diambil dari elemen-elemen masyarakat yang memang hampir setiap hari atau setiap periode pengurusan pemda selalu memantau atau menggunakan akuntabilitas pemerintah khususnya transparansi keuangan untuk kepentingannya masing-masing.

Metode yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling Method* yang merupakan sub dari *Judgement Sampling Method*. Menurut Djarwanto (2001) *purposive sampling method* adalah metode pengambilan sampel tidak secara acak dimana peneliti menggunakan pertimbangannya untuk memilih anggota sampel yang sekiranya dapat memberikan prospek yang baik bagi perolehan data yang akurat untuk tujuan tertentu.

Sampel terbagi dua yaitu internal dan eksternal pemerintah kabupaten.

- a. Internal pemerintah kabupaten antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Institusi lain dibawah internal Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Eksternal pemerintah kabupaten Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kabupaten Sleman, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sleman, Akademisi (bidang akuntansi sektor publik atau pemerintahan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Institusi lain

yang merupakan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Data Umum

Data umum adalah data atau gambaran umum mengenai latar belakang responden. Data-data tersebut diantaranya adalah:

1. Nama responden
2. Jenis kelamin
3. Institusi
4. Masa Kerja

3.2.2 Data Spesifik

Data spesifik adalah data yang diperlukan untuk digunakan dalam analisis persepsi. Data yang diperlukan yaitu:

1. Persepsi publik terhadap Akuntabilitas publik Pemkab Sleman secara umum.
2. Persepsi publik terhadap transparansi anggaran Pemkab Sleman.
3. Persepsi publik terhadap transparansi sistem akuntansi Pemkab Sleman.
4. Persepsi publik terhadap transparansi laporan keuangan Pemkab Sleman.
5. Signifikansi pengaruh laporan akuntabilitas keuangan Pemkab Sleman dengan pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam hal ini adalah kuesioner-kuesioner yang harus diisi oleh responden. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu mencoba memberikan kuesioner-kuesioner tersebut kepada beberapa pihak/institusi yang telah dipilih sebagai sampel dimana pihak-pihak tersebut memang secara langsung atau tidak langsung memantau pemerintah daerah khususnya dalam hal transparansi keuangan.

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak seluruh masyarakat atau publik yang memperhatikan atau memantau pemerintah daerah khususnya dalam hal transparansi keuangan tetapi hanya pihak-pihak tertentu saja. Pihak-pihak atau institusi yang dipilih oleh peneliti diberikan kuesioner dengan jumlah yang sama banyaknya. Sampel yang diambil oleh peneliti dianggap sudah mewakili publik dalam menyatakan persepsinya terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan hanya berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, majalah, artikel, dan data internet yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, akuntansi serta semua yang berhubungan dan mendukung wacana dalam penelitian ini.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian hipotesis pertama yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan persepsi yang terjadi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman adalah dengan menggunakan 3 (tiga) variabel penelitian antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik.
2. Secara umum akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik.
3. Secara umum Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan *Good Governance* dengan baik.

Untuk hipotesis kedua digunakan 1 (satu) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen, antara lain:

1. Transparansi laporan keuangan Pemkab Sleman.

Variabel ini merupakan salah satu indikator dari penerapan akuntabilitas keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya mengenai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Variabel dependen atau terikatnya adalah pengaruh laporan akuntabilitas keuangan, dalam hal ini adalah transparansi anggaran, transparansi sistem keuangan dan transparansi laporan keuangan terhadap pengambil keputusan oleh para pengguna laporan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

H_1 pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hipotesis ini merupakan hipotesis beda lebih dari dua proporsi populasi. Pengujian hipotesis terhadap beda lebih dari dua proporsi populasi tidak dapat menggunakan uji t atau uji F. uji hipotesis untuk beda lebih dari dua proporsi merupakan uji multinomial dan bentuk distribusi frekuensi (proporsi) lebih dari dua dikenal dengan istilah *chi-square distribution* atau kai kuadrat (Algifari, 2003).

Kai kuadrat adalah teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari atas dua kelas atau lebih, datanya berbentuk nominal. Jenis teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan harus sesuai dengan jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu data nominal, data ordinal atau data interval/rasio dari kelompok sampel yang diuji (Hasan, 2004).

Untuk pengujian hipotesis pertama, akan digunakan alat uji statistik friedman. Alasan penggunaan uji ini adalah berdasarkan jenis hubungan data yang akan dianalisis. Berikut ini tabel yang berisikan jenis variabel dan teknik statistik yang tepat dan sering dipakai dalam analisis hubungan menurut Hasan (2004). Dan menggunakan *independent samples T test* untuk mengetahui sejauh mana perbedaan persepsi yang terjadi antara internal pemerintah dengan eksternal pemerintah.

Pada hipotesis pertama berdasarkan tingkat eksplanasinya merupakan hipotesis beda yang akan diukur dengan pengujian hipotesis beda pula. Pengujian hipotesis beda adalah pengujian untuk mengetahui keadaan perbedaan sesuatu. Dalam hal ini signifikansi perbedaan yang terdapat dalam satu kelompok dengan kelompok lain (Hasan, 2004).

Karena pada variabel hipotesis pertama juga mempunyai sifat komparatif dan perbedaan maka analisis yang tepat digunakan adalah analisis komparatif k sampel berkorelasi dengan menggunakan uji friedman dengan analisis kai kuadrat dan diperkuat dengan *independent samples T test* menggunakan program SPSS 13.

Ada beberapa alasan tambahan penulis memilih uji friedman sebagai alat untuk menguji hipotesis ini. Pertama, data pada hipotesis ini kedua-duanya berbentuk data ordinal yaitu dengan menggunakan skala likert. Kedua, uji ini bisa untuk sampel besar $n \geq 30$.

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji friedman adalah sebagai berikut:

1. Menentukan formula hipotesis H_1

H_{o_1} = Tidak terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

H_{a_1} = Terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman

2. Menentukan formula hipotesis seperti pada subbab sebelumnya, selanjutnya menentukan taraf nyata (α) dan x^2 (kai kuadrat) tabel.

- Taraf nyata yang digunakan adalah 5% (0,05)
- Nilai x^2 memiliki derajat kebebasan (df) = $k - 1$

3. Menentukan nilai uji statistik dengan rumus:

$$x_0^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \sum (R_j)^2 - 3n(k+1)$$

Keterangan:

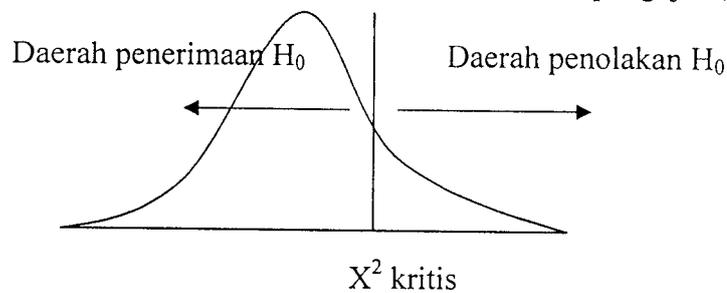
n = banyaknya baris dalam tabel

k = banyaknya kolom

R_j = jumlah rangking dalam kolom

X^2 = kai kuadrat

4. Pengambilan kesimpulan dengan menerapkan kriteria pengujian, yaitu:



H_0 diterima atau H_a ditolak, jika :

$$x^2 \text{ hitung} \leq x^2 \text{ kritis } (\alpha, df)$$

H_a diterima atau H_0 ditolak, jika :

$$x^2 \text{ hitung} \geq x^2 \text{ kritis } (\alpha, df)$$

Perhitungan uji friedman diolah dengan bantuan program SPSS 13.

3.5.2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Sedangkan hipotesis kedua (H_2) adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara publikasi laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan. Pada hipotesis yang kedua ini mengandung makna hipotesis hubungan kausalitas satu arah dimana ada beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hubungan kausal merupakan bentuk hubungan yang sifatnya sebab akibat, artinya keadaan satu variabel disebabkan atau ditentukan oleh keadaan satu atau lebih variabel lain (Hasan, 2004).

Pada H_2 alat analisis yang digunakan adalah uji t dan uji F dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hal ini dikarenakan pada hipotesis ini akan dicari prediksi perubahan variabel terikat (y) apabila terdapat pengaruh dari satu variabel bebas (x). Berdasarkan tingkat eksplanasinya H_2 merupakan hipotesis prediksi. Menurut Hasan (2004), pengujian hipotesis prediksi adalah pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah suatu variabel (independen) dapat digunakan untuk memprediksikan variabel lain (dependen).

Karena pada hipotesis kedua ini menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara dua variabel maka analisis yang tepat digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan uji t untuk mengetahui regresi parsial individual dan uji F untuk mencari tingkat signifikansi secara keseluruhan.

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan formula hipotesis H_2

H_{02} = Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara publikasi laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

H_{a2} = Terdapat pengaruh yang signifikan antara publikasi laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

2. Menentukan formula hipotesis seperti pada subbab sebelumnya, selanjutnya menentukan taraf nyata (α), t, dan F tabel.

- Taraf nyata yang digunakan adalah 5% (0,05)
- Nilai t tabel memiliki derajat kebebasan (df) = n-1
- Nilai F tabel memiliki derajat kebebasan (df), $v_1 = m-1$; $v_2 = n-m$
m = jumlah variabel, n = jumlah sampel

3. Menentukan nilai uji statistik dengan rumus:

$$F_0 = \frac{R^2(n-k-1)}{k(1-R^2)} \text{ atau } F_0 = \frac{\frac{R^2(\sum y^2)}{k}}{\frac{(1-R^2)(\sum y^2)}{n-k-1}}$$

$$t_0 = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-(r_p)^2}}$$

Bab IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian validitas dan reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas item kuesioner adalah untuk melihat tingkat keabsahan dan keandalan item kuesioner dalam mengukur variabel yang ada. Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukuran terhadap apa yang diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.

Sebelum data diolah lebih lanjut, terlebih dahulu data yang sudah terkumpul diuji validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan). Pengolahan uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 11. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian tersebut adalah menyusun hasil jawaban kuesioner dalam tabulasi nilai yang telah disajikan pada lampiran.

Validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah validitas internal. Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Sebuah instrumen dapat disebut memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrumen mendukung tujuan instrumen secara keseluruhan, yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud. Yang dimaksud dengan bagian instrumen dapat berupa butir-butir pertanyaan dari kuesioner atau butir-butir soal tes, tetapi dapat pula kumpulan dari butir-butir tersebut yang

mencerminkan sesuatu faktor (Suharsimi Arikunto, 1998 hal 163). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas dengan analisis faktor.

Validitas dengan analisis faktor dilakukan dengan didahului oleh suatu asumsi bahwa instrumen dapat dikatakan valid jika setiap faktor yang membentuk instrumen tersebut sudah valid. Analisis faktor dapat dilakukan apabila antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat kesamaan, kesinambungan atau tumpang tindih. Hal ini dapat diuji dengan mengkorelasikan skor-skor yang ada dalam satu faktor dijumlah terlebih dahulu. Dengan jumlahnya skor pada faktor lain. Analisis faktor dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total, sesudah terlebih dahulu mengetahui kekhususan tiap-tiap faktor (Suharsimi Arikunto, 1998 hal 167-169).

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, reliabel dalam penelitian ini akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Uji reliabilitas yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali pengtesan.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik rumus alpha karena teknik ini cocok digunakan untuk pengujian pada angket atau kuesioner yang menggunakan skala bertingkat (Suharsimi Arikunto, 1998 hal 178). Hasil dari perhitungan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat dalam lampiran.

Tabel tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari proses perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS 11. Terlihat bahwa keseluruhan daftar pernyataan dalam kuesioner adalah valid dan reliable, hal ini terbukti dari kesimpulan dari tiap tiap item pernyataan menyatakan valid dan reliabel. Jika keseluruhan pernyataan dalam kuesiner tersebut sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitasnya, maka kuesioner tersebut layak untuk disebar pada tiap-tiap responden.

Tabel 4.1.1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Akuntabilitas

Item	Nilai validitas (r_{xy})	Reliabilitas (α)	r tabel	Kesimpulan
Akunt 1	0,7919	0,9206	0,3060	Valid/Reliabel
Akunt 2	0,8741	0,8552	0,3060	Valid/Reliabel
Akunt 3	0,8610	0,8705	0,3060	Valid/Reliabel

Sumber: *data primer yang diolah*

Dari ke-3 butir pertanyaan tentang akuntabilitas, menunjukkan nilai validitas (r_{xy}) lebih besar dari r tabel (r tabel *product moment* = 0,3060 dilihat dari $N=30$ dengan signifikansi= 5% uji *one-tail*). Berarti ke-3 butir pertanyaan akuntabilitas tersebut VALID semua. Sehingga layak untuk dianalisis selanjutnya.

Tabel 4.1.2

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Transparansi Anggaran

Item	Nilai validitas (r_{xy})	Reliabilitas (α)	r tabel	Kesimpulan
Trans. Angg 1	0,4307	0,9674	0,3060	Valid/Reliabel
Trans. Angg 2	0,8971	0,8838	0,3060	Valid/Reliabel
Trans. Angg 3	0,8974	0,8838	0,3060	Valid/Reliabel
Trans. Angg 4	0,9035	0,8826	0,3060	Valid/Reliabel
Trans. Angg 5	0,8843	0,8868	0,3060	Valid/Reliabel

Sumber: data primer yang diolah

Dari ke-5 butir pertanyaan tentang transparansi anggaran, menunjukkan nilai validitas (r_{xy}) lebih besar dari r tabel (r tabel *product moment* = 0,3060 dilihat dari N= 30 dengan signifikansi= 5% uji *one-tail*). Berarti ke-5 butir pertanyaan transparansi anggaran tersebut VALID semua. Sehingga layak untuk dianalisis selanjutnya.

Tabel 4.1.3

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Transparansi Sistem

Item	Nilai validitas (r_{xy})	Reliabilitas (α)	r tabel	Kesimpulan
Trans. Sist 1	0,8825	0,9685	0,3060	Valid/Reliabel
Trans. Sist 2	0,9329	0,9555	0,3060	Valid/Reliabel
Trans. Sist 3	0,9345	0,9542	0,3060	Valid/Reliabel
Trans. Sist 4	0,9395	0,9529	0,3060	Valid/Reliabel

Sumber: data primer yang diolah

Dari ke-4 butir pertanyaan tentang transparansi sistem, menunjukkan nilai validitas (r_{xy}) lebih besar dari r tabel (r tabel *product moment* = 0,3060 dilihat dari N= 30 dengan signifikansi= 5% uji *one-tail*). Berarti ke-4 butir

Dari ke-4 butir pertanyaan tentang signifikansi akuntabilitas dan keputusan, menunjukkan nilai validitas (r_{xy}) lebih besar dari r tabel (r tabel *product moment* = 0,3060 dilihat dari $N=30$ dengan signifikansi= 5% uji *one-tail*). Berarti ke-4 butir pertanyaan signifikansi akuntabilitas dan keputusan tersebut VALID semua. Sehingga layak untuk dianalisis selanjutnya.

4.2. Analisis deskriptif

Berdasarkan data umum dari jawaban angket kuesioner telah dilakukan analisis deskriptif yang menggambarkan tentang keadaan responden. Analisis deskriptif ini menguraikan tentang jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, masa kerja. Dari 170 kuesioner yang disebar, sebanyak 157 kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis dan sisanya tidak dikembalikan. Hal ini dikarenakan engganannya beberapa responden untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Sleman. Penjelasan selanjutnya dalam keterangan sebagai berikut:

1. Jenis kelamin

Responden yang berhasil dikumpulkan pada penelitian ini berjumlah 157 responden. Dari hasil kuesioner yang dikembalikan dapat dilihat analisis tentang jenis kelamin responden seperti nampak pada tabel

4.2.1

Tabel 4.2.1

Jumlah responden menurut jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Wanita	61	38.85%
2	Pria	96	61.15%
	Total	157	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 4.2.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kelamin responden yang terbesar adalah pria yang berjumlah 96 dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 61.

2. Pendidikan Terakhir

Latar belakang pendidikan turut andil dalam menentukan persepsi seseorang. Dari hasil jawaban kuesioner dapat dilihat analisis tentang pendidikan akhir responden. Keterangan lebih lanjut ditunjukkan dalam tabel 4.2.2.

Tabel 4.2.2

Jumlah responden menurut pendidikan terakhir

No.	Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase
1	SLTA		
2	D3	13	8.28%
3	S1	104	66.24%
4	S2	40	25.48%
5	S3	0	0
	Total	157	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa persentase latar belakang pendidikan yang paling besar adalah S1 dengan jumlah 104 atau 66,24%, kemudian S2 dengan jumlah 40 atau 25,48%, D3 dengan jumlah 13 atau 8,28%, dan terakhir adalah SLTA dan S3 yang berjumlah 0 karena tidak ada responden yang berpendidikan setara dengan itu.

3. Institusi

Latar belakang Institusi yang dipilih oleh peneliti mengenai hubungannya dengan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Sleman, karena institusi tersebut mengamati atau sebagai pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dari kuesioner yang sudah terkumpul dapat kita lihat jumlah institusi maupun responden di dalamnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2.3

Tabel 4.2.3

Jumlah responden menurut institusi

No.	Institusi	Jumlah	Persentase
1	DPRD	17	10.83%
2	BPKKD	25	15.92%
3	BAPPEDA	25	15.92%
4	BAWASDA	25	15.92%
5	KADINDA	5	3.18%
6	IRE	5	3.18%
7	FORUM LSM	19	12.10%
8	IMPRESS	5	3.18%
9	AKADEMISI	6	3.82%
10	KPUD	25	15.92%
	Total	157	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Institusi responden penelitian ini, seperti nampak pada tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa ada beberapa institusi yang menunjukkan persentase yang sama besar dan sekaligus yang terbesar, institusi tersebut adalah BPKKD, BAPPEDA, BAWASDA, dan KPUD Sleman yaitu 25 responden atau 15,92%, kemudian diikuti Forum LSM dengan jumlah 19 responden atau 12,10%, DPRD berjumlah 17 responden, akademisi berjumlah 6 responden atau 3,82%, terakhir KADINDA Sleman, IRE dan IMPRESS yang memiliki jumlah terkecil dan sama-sama berjumlah 5 orang responden atau 3,18%.

4. Masa Kerja

Lamanya kerja seseorang atau masa kerja turut mendukung penentuan persepsi. Semakin lama seseorang bekerja disuatu instansi maka semakin lama pula dia mengenal akuntabilitas. Hasil dari penelitian yang menunjukkan masa kerja responden dapat dilihat pada tabel 4.2.4

Tabel 4.2.4

Jumlah responden menurut masa kerja

No.	Masa kerja	Jumlah	Persentase
	kurang dari 2 tahun	6	3.82%
	3 - 5 tahun	34	21.66%
	5 - 7 tahun	35	22.29%
	lebih dari 7 tahun	82	52.23%
	Total	157	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 4.2.4 dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak diantara responden yang mempunyai pengalaman kerja lebih dari 7 tahun, hal ini terbukti pada data yang tertera yaitu responden yang mempunyai masa kerja lebih dari 7 tahun menempati posisi teratas dengan 82 responden atau 52.23%, lalu diikuti responden yang memiliki masa kerja 5 – 7 tahun sebanyak 35 orang atau 35%, masa kerja 3 – 5 tahun sebanyak 34 responden atau 21,66%, dan terakhir responden terkecil yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun sebanyak 6 orang atau 3,82%.

4.3. Analisis Kuantitatif

4.3.1. Analisis Kuantitatif Pada Hipotesis Pertama (H1)

Friedman test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif k sampel (Hasan, 2004). Alasan menggunakan uji ini adalah karena data atau variabel yang ada bersifat membandingkan dari banyak sampel yang saling berhubungan.

Didalam friedman test sendiri terdapat χ^2 atau kai kuadrat sebagai formula dalam pengambilan keputusan dimana kai kuadrat digunakan untuk menguji keselarasan di mana pengujian dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan antara frekuensi observasi (f_o) dengan frekuensi yang diharapkan (f_a), dari sampel yang terbatas di mana merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak (Mustofa, 1995). Dalam penelitian ini, uji tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi antara pengguna laporan akuntabilitas keuangan

pemerintah kabupaten sleman mengenai akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten sleman.

Yang pertama dilakukan dalam menganalisis adalah menyusun data-data dalam suatu tabel kontingensi r x k (r menunjukkan baris dan k menunjukkan kolom), hal ini dapat dilihat pada lampiran 4.

Tabel 4.3.1.1

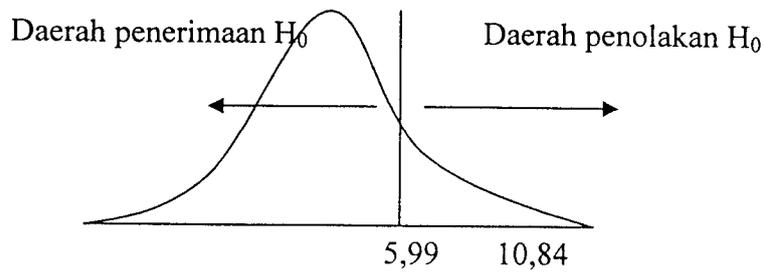
Akumulasi data persepsi

Persepsi	Variabel-variabel dalam kuesioner		
	Akuntabilitas		
Responden	1	2	3
SS	28	14	0
S	106	124	128
TS	23	19	17
STS	0	0	3
Total	157	157	157

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel di atas terlihat pengelompokan-pengelompokan sudah dilakukan berdasar sikap responden sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Untuk tahap selanjutnya pengujian hipotesis (lampiran 5) dengan menggunakan uji frtiedman k sampel berkorelasi untuk menghitung x^2 hitung. Dengan program SPSS 13 (lihat lampiran 4) hasil yang diperoleh untuk x^2 hitung adalah 10,84 dan *degree of freedom* (df) sama dengan 2, $\alpha = 5\%$ dan nilai x^2 kritis sebesar 5,99. Karena x^2 hitung lebih besar dari x^2 kritis maka keputusan dalam hipotesis ini adalah menolak H_0 . Dengan demikian kesimpulannya adalah terdapat perbedaan persepsi diantara para

pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.



Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan hasil hitung SPSS 13 tersebut di atas dapat pula dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas dengan besarnya tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam pengujian. Jika nilai probabilitas (*asyp.sig*) lebih kecil dari α yang digunakan (lampiran 4), maka keputusannya adalah menolak H_0 dan begitu sebaliknya jika *asyp.sig* lebih besar dari α yang digunakan maka keputusannya menerima H_0 . Hasil perhitungan pada data diatas menghasilkan nilai probabilitas atau *p-value* = 0,04. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$ atau 5%). Kesimpulan dalam pengujian ini adalah sama yaitu menolak H_0 yang berarti terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel hasil uji friedman dibawah:

Tabel 4.3.1.2

Hasil uji Friedman

N	157
Chi-Square	10,840
Df	2
Asymp. Sig.	,004

Sumber: data primer yang diolah

Untuk analisis selanjutnya adalah uji hipotesis independen sampel yang merupakan pengelompokan dari sekian banyak sampel yang diteliti menjadi dua populasi yang akan diperbandingkan apakah menerima H_0 ataukah menerima H_0 .

Tabel 4.3.1.3

Hasil perhitungan independen sampel T test

Group Statistics

	institusi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
prinsip akuntabilitas	internal	92	3,2283	,44729	,04663
	eksternal	65	2,7538	,61316	,07605
akuntabilitas scr umum	internal	92	3,0870	,31976	,03334
	eksternal	65	2,8000	,56458	,07003
good governance	internal	92	3,0435	,29326	,03057
	eksternal	65	2,7231	,62519	,07755

Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means								
	Equal variances assumed	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
prinsip akuntabilitas	Equal variances assumed	9,190	,003	5,60	155	,014	,474	,084	,307	,641

	Equal variances not assumed			5,31	110,2	,013	,474	,089	,297	,651
akuntabilitas umum	Equal variances assumed	9,472	,002	4,04	155	,016	,286	,070	,146	,427
	Equal variances not assumed			3,70	92,9	,014	,286	,077	,132	,440
good governance	Equal variances assumed	9,631	,002	4,29	155	,020	,320	,074	,173	,467
	Equal variances not assumed			3,84	84,01	,018	,320	,083	,154	,486

Sumber: data primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terlihat dari tiap-tiap variabel memiliki tingkat signifikansi perbedaan yang berbeda jika dilihat dari perbandingan institusi internal dan eksternal pemerintah. Tampilan tabel diatas menunjukkan hasil dengan asumsi variansi sama dan variansi berbeda. Untuk menentukan bentuk anggapan variansi yang benar sebaiknya dilakukan uji hipotesis kesamaan variansi (Sutanta, 2005). Uji pertama menggunakan uji kesamaan variansi dengan metode *Levenne* hasilnya adalah untuk nilai *Sig* variabel prinsip akuntabilitas sebesar 0,003, nilai *Sig* variabel akuntabilitas secara umum sebesar 0,002 dan nilai *Sig* variabel good governance sebesar 0,002. Nilai *Sig* masing-masing variabel dibawah $\alpha = 0,05$ berarti sehingga kesamaan variansi ditolak atau asumsi variansi tidak sama (*equal variance not assumed*).

Pada uji rata-rata (mean), tampak pada variansi yang diasumsikan tidak sama, t hitung yang diperoleh secara berurutan variabel prinsip akuntabilitas, akuntabilitas

dan good governance adalah 5,31, 3,7 dan 3,84 dengan nilai *sig* 0,013, 0,014 dan 0,018. Karena semua *sig* < α maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini adalah antara internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap variabel-variabel diatas.

4.3.2. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman

4.3.2.1. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan

Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 4.3.2.1 di bawah ini.

Tabel 4.3.2.1

Persepsi publik terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan
Pemerintah Kabupaten Sleman

Persepsi Responden	Akuntabilitas	
	1	%
SS	28	18%
S	106	68%
TS	23	15%
STS	0	0%
Total	157	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan kolom nomor 1 pada tabel di atas yang menyatakan sangat setuju (SS) terhadap pernyataan nomor 1 yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan akuntabilitas publik dengan baik sebanyak 28 responden atau 18%, yang menyatakan setuju (S) sebanyak 106 responden atau 68%, yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 23 responden atau 15 % dan yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 (nol) responden atau 0%.

Dapat disimpulkan bahwa dari 157 responden, 106 responden atau 68% dari keseluruhan responden menyatakan setuju bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik.

4.3.2.2. Akuntabilitas secara umum

Tabel 4.3.2.2

Persepsi publik terhadap akuntabilitas secara umum

Persepsi Responden	Akuntabilitas	
	2	%
SS	14	9%
S	124	79%
TS	19	12%
STS	0	0%
Total	157	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Kolom nomor 2 pada tabel di atas yang menyatakan sangat setuju (SS) terhadap pernyataan nomor 2 yaitu secara umum akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik sebanyak 14 responden atau 9%, yang menyatakan setuju (S) sebanyak 124 responden atau 79%, yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 19

responden atau 12 % dan yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 (nol) responden atau 0%.

Dapat disimpulkan bahwa dari 157 responden, 124 responden atau 79% dari keseluruhan responden menyatakan setuju bahwa secara umum akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik.

4.3.2.3. Prinsip *good governance* secara umum

Tabel 4.3.2.3

Persepsi publik terhadap prinsip *good governance* secara umum

Persepsi Responden	Akuntabilitas	
	3	%
SS	9	6%
S	128	82%
TS	17	11%
STS	3	2%
Total	157	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Kolom nomor 3 pada tabel di atas yang menyatakan sangat setuju (SS) terhadap pernyataan nomor 3 yaitu secara umum Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan *Good Governance* dengan baik sebanyak 9 responden atau 6%, yang menyatakan setuju (S) sebanyak 128 responden atau 82%, yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 17 responden atau 11 % dan yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 3 responden atau 2%.

Dapat disimpulkan bahwa dari 157 responden, 128 responden atau 82% dari keseluruhan responden menyatakan setuju bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan *Good Governance* dengan baik.

4.3.2.4. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 4.3.2.4

	Wanita	persentase	Pria	Persentase
SS	21	11%	30	10%
S	140	77%	218	76%
TS	20	11%	39	14%
STS	2	1%	1	0%
total	183	100%	288	100%

Sumber: data primer yang diolah

Pada tabel 4.3.2.4 di atas merupakan penilaian persepsi publik terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin wanita yang menyatakan sangat setuju sebesar 11% responden, yang menyatakan setuju sebesar 77% responden, yang menyatakan tidak setuju sebesar 11% responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0% responden atau tidak ada.

Selanjutnya, pada responden yang berjenis kelamin pria yang menyatakan sangat setuju sebesar 10% responden, yang menyatakan setuju sebesar 76% responden, yang menyatakan tidak setuju sebesar 14% responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0% responden.

Berdasarkan persentase keseluruhan yang dihasilkan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa responden berjenis kelamin wanita mempunyai persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju sebesar 77% ditambah yang menyatakan sangat setuju sebesar 11% jadi 88%, sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju hanya 11%.

Begitu pula dengan responden berjenis kelamin pria juga mempunyai persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju sebesar 76% ditambah yang menyatakan sangat setuju sebesar 10% jadi 86%, sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju sebesar 14%.

Jika dilihat persepsi publik dengan responden berjenis kelamin wanita dan pria, keduanya mempunyai persepsi yang sama yaitu baik. Tetapi tingkat persepsinya sedikit berbeda walaupun persepsinya sama. Responden berjenis kelamin wanita sebesar 88% sedangkan responden berjenis kelamin pria sebesar 82% , jadi terdapat selisih penilaian persepsi sebesar 2% lebih besar responden yang berjenis kelamin wanita.

Simpulan sementara yang dapat ditarik dari perhitungan analisis diatas adalah bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi banyak terhadap tingkat persepsi mereka terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, hal ini ditandai

dengan kecilnya tingkat perbedaan persentase kedua jenis kelamin tersebut yaitu sebesar 2%.

**4.3.2.5. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan
Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan pendidikan terakhir**

Tabel 4.3.2.5

	SLTA	%	D3	%	S1	%	S2	%	S3	%
SS	0	0%	4	12%	32	10%	10	8%	0	0%
S	0	0%	27	79%	231	74%	100	83%	0	0%
TS	0	0%	3	9%	46	15%	10	8%	0	0%
STS	0	0%	0	0%	3	1%	0	0%	0	0%
total	0	0%	34	100%	312	100%	120	100%	0	0%

Sumber: data primer yang diolah

Pada tabel 4.3.2.5 di atas merupakan penilaian persepsi publik terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan pendidikan terakhir responden. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa responden yang berpendidikan terakhir SLTA dan S3 yang menyatakan sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada atau 0%, sedangkan responden berpendidikan terakhir D3, S1 dan S2 yang menyatakan sangat setuju secara berurutan sebesar 12%, 10% dan 8% responden, yang menyatakan setuju secara berurutan sebesar 79%, 74% dan 83% responden, yang menyatakan tidak setuju secara berurutan sebesar 9%, 15% dan 8% responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%, 1% dan 0% responden.

Berdasarkan persentase keseluruhan yang dihasilkan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa responden berpendidikan terakhir D3, S1 dan S2 mempunyai

persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju secara berurutan adalah sebesar 79%, 74% dan 83% ditambah dengan yang menyatakan sangat setuju secara berurutan sebesar 12%, 10% dan 8%, jadi 91%, 84% dan 91% sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju hanya secara berurutan sebesar 9%, 16% dan 8%.

Jika dilihat persepsi publik dengan responden yang berpendidikan D3, S1 dan S2, ketiganya mempunyai persepsi yang sama yaitu baik. Tetapi tingkat persepsinya sedikit berbeda walaupun persepsinya sama. Responden berpendidikan terakhir D3 sebesar 91%, responden berpendidikan terakhir S1 sebesar 84% dan responden berpendidikan terakhir S2 sebesar 91%. Jadi hanya terdapat selisih penilaian persepsi sebesar 7% lebih besar responden yang berpendidikan terakhir D3 dan S2.

4.3.2.6. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan

Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan masa kerja

Tabel 4.3.2.6

	kurang dari 2 thn	%	3 - 5 thn	%	5 - 7 thn	%	lebih dari 7 thn	%
SS	0	0%	6	6%	12	11%	31	13%
S	14	78%	66	65%	72	69%	206	84%
TS	4	22%	30	29%	18	17%	9	4%
STS	0	0%	0	0%	3	3%	0	0%
Total	18	100%	102	100%	105	100%	246	100%

Sumber: data primer yang diolah

Pada tabel 4.3.2.6 di atas merupakan penilaian persepsi publik terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan masa kerja responden. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa responden masa kerjanya kurang dari 2 tahun, 3-5 tahun, 5-7 tahun dan lebih dari 7 tahun yang menyatakan sangat setuju secara berurutan sebesar 0%, 6%, 11% dan 13% responden, yang menyatakan setuju secara berurutan sebesar 78%, 65%, 69% dan 84% responden, yang menyatakan tidak setuju secara berurutan sebesar 22%, 29%, 17% dan 4% responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 0%, 0%, 3% dan 0% responden.

Berdasarkan persentase keseluruhan yang dihasilkan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa responden yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun, 3-5 tahun, 5-7 tahun dan lebih dari 7 tahun mempunyai persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju secara berurutan adalah sebesar 78%, 65%, 69% dan 84% ditambah dengan yang menyatakan sangat setuju secara berurutan sebesar 0%, 6%, 11% dan 13%, jadi 78%, 71%, 80 dan 97% sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju hanya secara berurutan sebesar 22%, 29%, 20% dan 4%.

Jika dilihat persepsi publik dengan responden yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun, 3-5 tahun, 5-7 tahun dan lebih dari 7 tahun mempunyai persepsi yang sama yaitu baik. Tetapi tingkat persepsinya sedikit berbeda walaupun persepsinya sama. Responden yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun sebesar 78%, responden yang masa kerjanya 3-5 tahun sebesar 71%, responden yang masa kerjanya 5-7 tahun

sebesar 80% dan responden yang masa kerjanya lebih dari 7 tahun sebesar 97%. Jadi hanya terdapat selisih penilaian persepsi sebesar 7-19% diantara para responden menurut masa kerjanya.

4.3.2.7. Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan institusi.

Tabel 4.3.2.7

Penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan

Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan institusi

Internal Pemerintah Kabupaten Sleman

Persepsi responden	SS				S				TS				STS			
	1	2	3	tot.	1	2	3	tot.	1	2	3	tot.	1	2	3	tot.
BAPPEDA	5	2	1	8	20	23	23	66	0	0	1	1	0	0	0	0
BAWASDA	5	3	1	9	19	21	23	63	1	1	1	3	0	0	0	0
BPKKD	5	2	2	9	20	23	23	66	0	0	0	0	0	0	0	0
DPRD Sleman	7	2	2	11	10	15	15	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	22	9	6	37	69	82	84	235	1	1	2	4	0	0	0	0

Sumber: data primer yang diolah

Persepsi Responden	Akuntabilitas						Total	Persentase
	1	%	2	%	3	%		
SS	22	24%	9	10%	6	7%	37	13%
S	69	75%	82	89%	84	91%	235	85%
TS	1	1%	1	1%	2	2%	4	2%
STS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	92	100%	92	100%	92	100%	276	100%

Sumber: data primer yang diolah

Eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman

Persepsi responden	SS				S				TS				STS			
	1	2	3	tot.	1	2	3	tot.	1	2	3	tot.	1	2	3	tot.
Akademisi	0	0	0	0	5	5	5	15	1	1	1	3	0	0	0	0
IRE	0	0	0	0	0	1	1	2	5	4	4	13	0	0	0	0
KADINDA	2	1	1	4	2	3	4	9	1	1	0	2	0	0	0	0
KPUD Sleman	3	4	2	9	17	16	19	52	5	5	3	13	0	0	1	1
Forum LSM	0	0	0	0	9	12	10	31	10	7	7	24	0	0	2	2
IMPRESS	0	1	0	1	4	3	4	11	1	1	1	3	0	0	0	0
Total	5	6	3	14	37	40	43	120	23	19	16	58	0	0	3	3

Sumber: data primer yang diolah

Persepsi Responden	Akuntabilitas						Total	Persentase
	1	%	2	%	3	%		
SS	5	8%	6	9%	3	5%	14	7%
S	37	57%	40	62%	43	66%	120	61%
TS	23	35%	19	29%	16	25%	58	30%
STS	0	0%	0	0%	3	5%	3	2%
Total	65	100%	65	100%	65	100%	195	100%

Sumber: data primer yang diolah

Pada tabel 4.3.2.7 di atas merupakan penilaian persepsi publik terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan institusi. Pernyataan dari kolom nomor 1, 2 dan 3 berisi tentang:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik.
2. Secara umum akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik.
3. Secara umum Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan *Good Governance* dengan baik.

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa internal Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyatakan sangat setuju pada kolom 1, 2 dan 3 secara berturut-turut sebanyak

22, 9 dan 6 atau sebesar 24%, 10% dan 7% responden, yang menyatakan setuju sebanyak 69, 82 dan 84 atau sebesar 75%, 89% dan 91% responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1, 1 dan 2 atau sebesar 1%, 1%, dan 0% responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 (nol) responden atau tidak ada.

Selanjutnya, pada eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyatakan sangat setuju pada kolom 1, 2 dan 3 secara berturut-turut sebanyak 5, 6 dan 3 atau sebesar 8%, 9% dan 5% responden, yang menyatakan setuju sebanyak 37, 40 dan 43 atau sebesar 57%, 62% dan 66% responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 23, 19 dan 16 atau sebesar 35%, 29%, dan 25% responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0, 0 dan 3 atau 0%, 0% dan 5% responden.

Berdasarkan persentase keseluruhan yang dihasilkan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa internal Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju sebesar 85% ditambah yang menyatakan sangat setuju sebesar 13% jadi 98%, sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju hanya 2%.

Begitu pula dengan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman juga mempunyai persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju sebesar 61%

ditambah yang menyatakan sangat setuju sebesar 7% jadi 68%, sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju sebesar 32%.

Jika dilihat antara persepsi publik dengan responden internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman, keduanya mempunyai persepsi yang sama yaitu baik. Tetapi tingkat persepsinya jauh berbeda walaupun persepsinya sama. Internal Pemerintah sebesar 98% sedangkan eksternal pemerintah 68% , jadi terdapat selisih penilaian persepsi sebesar 20% lebih besar internal pemerintah.

4.3.2.8. Akumulasi penilaian persepsi publik

Tabel 4.3.2.8

Akumulasi penilaian persepsi para pengguna laporan akuntabilitas keuangan
Pemerintah Kabupaten Sleman

Persepsi Responden	Akuntabilitas						Total	Persentase
	1	%	2	%	3	%		
SS	28	18%	14	9%	9	6%	51	11%
S	106	68%	124	79%	128	82%	358	76%
TS	23	15%	19	12%	17	11%	59	13%
STS	0	0%	0	0%	3	2%	3	1%
Total	157	100%	157	100%	157	100%	471	100%

Sumber: data primer yang diolah

Pada tabel 4.3.2.5 di atas merupakan akumulasi pernyataan mengenai persepsi responden terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pernyataan dari kolom nomor 1, 2 dan 3 berisi tentang:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik.

2. Secara umum akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik.
3. Secara umum Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan *Good Governance* dengan baik.

Dari keseluruhan penilaian terhadap masing-masing pernyataan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyatakan sangat setuju (SS) bahwa akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik sebesar 11%, yang menyatakan setuju (S) sebesar 76%, yang menyatakan tidak setuju (TS) sebesar 13% dan terakhir yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebesar 1%.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan ternyata publik masih menilai bahwa akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Hal ini terbukti dari akumulasi banyaknya responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik. Sebesar 76% yang menyatakan setuju ditambah lagi dengan 11% yang menyatakan sangat setuju jadi keseluruhan 87% yang menyatakan jika akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik sedangkan yang menyatakan tidak baik atau buruk sebesar 14% yang merupakan akumulasi dari pernyataan setuju dan sangat tidak setuju.

4.3.3. Analisis Kuantitatif Pada Hipotesis Kedua (H2)

Pada hipotesis kedua peneliti menguji mengenai pengaruh laporan akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil oleh para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada pengujian hipotesis yang kedua ini (lampiran 7) peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana

dan melakukan uji t untuk mengetahui regresi parsial individual dan uji F untuk menentukan signifikansi secara keseluruhan mengenai pengaruh antara laporan publikasi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis ketergantungan antara dua variabel dengan maksud menaksir dan meramalkan nilai rata-rata variabel dependen (Nurhayati, 1998). Meskipun regresi berhubungan dengan ketergantungan tetapi tidak harus sebab akibat yang hanya hubungan satu arah.

Tabel pada lampiran 2 sudah dikelompokkan hasil dari kuesioner yang telah disebar mengenai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebelum dianalisis menggunakan regresi linear sederhana pada lampiran 6, tiap-tiap variabel dicari rata-ratanya (mean) baik variabel dependen (y) maupun variabel independen (x).

Hasil persamaan yang diperoleh dari perhitungan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen dan intercepnya adalah sebagai berikut:

$$y = a + bx + e$$

Keterangan:

- y = variabel terikat
- x = variabel bebas
- a = intercept
- b = koefisien
- e = error term

Persamaan diatas digunakan untuk menaksir nilai y jika a , b dan x diketahui. Nilai a merupakan nilai y yang dipotong oleh kurva linier pada sumbu vertikal y , atau dengan kata lain, a adalah nilai y jika $x = 0$. nilai b adalah kemiringan (*slope*) kurva linier yang menunjukkan besarnya perubahan nilai y sebagai akibat dari perubahan setiap unit nilai x . besarnya a dan b konstan sepanjang kurva linier.

Persamaan $y = a + bx + e$ merupakan model matematis probabilistik (*probabilistic mathematical model*) atau disebut juga dengan istilah model matematis stochastic (*stochastic mathematical model*). Nilai y pada persamaan ini belum dapat diketahui, walaupun nilai variabel x diketahui. Hal ini disebabkan karena pada persamaan tersebut masih terdapat factor kesalahan (e). besarnya e dapat ditentukan dengan formulasi $e = Y - \hat{Y}$.

$$\begin{aligned} y &= a + bx + e \\ &= 2,558 + 0,165x + e \end{aligned}$$

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. Apabila dilihat dari tanda-tanda yang menyertai koefisien regresi, maka dapat dikatakan bahwa tanda positif yang menyertai x mempunyai arti bahwa apabila laporan publikasi keuangan meningkat maka tingkat pengambilan keputusan akan meningkat pula, atau artinya berbanding lurus.

Kesalahan standar koefisien regresi (standar error) $S_b = 0,075$ dan nilai t hitung adalah nilai yang digunakan dalam pengujian terhadap koefisien regresi untuk

mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan nilai variabel dependen. Nilai kritis yang terjadi adalah $t_{(155,0,05)} = \pm 1,65$.

Nilai statistik t hitung sebesar 2,195 lebih besar daripada t kritis = 1,65. Maka keputusannya adalah menolak H_0 yang artinya secara statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara publikasi laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

Pengujian terhadap pengaruh x terhadap y juga dapat dilakukan dengan menggunakan sig. Nilai sig = 0,03 lebih kecil dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ sehingga keputusannya menolak H_0 , artinya secara statistik hasilnya konsisten dengan hasil pengujian dengan menggunakan nilai t hitung.

Tabel 4.3.3.1

Hasil perhitungan regresi

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,537	1	,537	4,818	,030(a)
	Residual	17,285	155	,112		
	Total	17,822	156			

a Predictors: (Constant), publikasi laporan keuangan

b Dependent Variable: pengambilan keputusan

Sumber: data primer yang diolah

Pengujian selanjutnya adalah uji F (lampiran 6) dimana nilai F hitung = 4,818 lebih besar dari nilai F kritis = 3,9. Dari hasil ini perhitungan statistik regresi yang dilakukan masih konsisten yaitu menolak H_0 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara publikasi laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

Tabel 4.3.3.2
Koefisien Determinasi Antara
Variabel Dependen dan Independen

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,821(a)	,744	,713	,33394	,744	4,818	1	155	,030

a Predictors: (Constant), publikasi laporan keuangan

Sumber: data primer yang diolah

Tabel diatas mengenai pengujian koefisien determinasi majemuk atau *R square* (R^2) yang digunakan untuk mengukur bagaimana proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama yang dijelaskan oleh model regresi. R^2 semata-mata untuk taksiran yang dapat diandalkan dari koefisien regresi populasi yang sebenarnya dan menarik kesimpulan statistik mengenai koefisien tadi dan lebih menekankan pada relevansi logis atau teoritis dari variabel yang menjelaskan dengan variabel tak bebas dan arti statistiknya.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, R^2 atau *R square* sebesar 0,744 atau 74%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan model regresi dapat memberikan hasil yang cukup baik, karena variabel dependen sebesar 74%, sedangkan 26% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan tersebut. Hal ini diperkuat oleh nilai R^2 yang telah disesuaikan (*adjusted R square*) sebesar 0,713 atau 71%.

Bab V
SIMPULAN, SARAN DAN
KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Simpulan

Pada bab ini penulis menyampaikan simpulan yang merupakan ringkasan dari berbagai uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan responden berjumlah 157 orang yang mempunyai latar belakang dari 10 institusi yang berbeda-beda, yaitu internal Pemerintah Kabupaten Sleman dan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa simpulan penelitian, yaitu:

1. Berdasarkan pengujian statistik terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada 157 responden dapat diambil simpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Persepsi publik dengan responden internal Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju sebesar 85% ditambah yang

menyatakan sangat setuju sebesar 13% jadi 98%, sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju hanya 2%.

3. Persepsi publik dengan responden eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman juga mempunyai persepsi baik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase yang menyatakan setuju bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman adalah baik. Persentase yang menyatakan setuju sebesar 61% ditambah yang menyatakan sangat setuju sebesar 7% jadi 68%, sedangkan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju sebesar 32%
4. Terdapat tingkat persentase persepsi yang berbeda walaupun persepsinya sama baik persepsi responden berdasarkan institusi, pendidikan terakhir, jenis kelamin maupun masa kerja.
5. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat menjawab pertanyaan pokok masalah yaitu publik sleman masih menganggap Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan baik.
6. Terdapat pengaruh laporan publikasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pengambilan keputusan para pengguna laporan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hanya pada taraf signifikansi pengaruhnya masih rendah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini dikemukakan ada beberapa saran yang layak digunakan untuk penelitian sejenis kedepannya, antara lain:

1. Bagi institusi internal Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan lagi akuntabilitas publik terutama dalam hal keuangan karena hal tersebut material dan mudah diukur pertanggungjawabannya.
2. Bagi institusi eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman tetap mengawasi atau melakukan mekanisme kontrol terhadap akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bagi akademisi akuntansi sektor publik hendaknya melihat akuntansi pemerintahan tidak hanya dari teori-teori di buku tetapi ikut serta memperhatikan segi praktisnya sehingga muncul kritik konstruktif terhadap akuntabilitas khususnya pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Hendaknya dilakukan penelitian lanjutan yang sejenis dengan memperbanyak sampel institusi sehingga analisis persepsi publik terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dimungkinkan memperoleh hasil dengan tingkat akurasi yang lebih baik.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini adalah:

1. Regulasi undang-undang yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan sewaktu-waktu dapat berubah sehingga akan membuat beberapa data yang ada dalam penelitian ini menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan kedepannya.
2. Jumlah sampel yang hanya terbatas pada 157 responden dari 10 institusi, jika dilihat dari keseluruhan jumlah populasi yang ada di Jogja yaitu penduduk yang sebesar.....jiwa baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman, jumlah sampel tersebut tergolong kecil. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti mengenai informasi penduduk ataupun institusi-institusi paham atau mengamati Pemerintah Kabupaten Sleman terutama dalam hal akuntabilitas keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2003). *Statistika induktif untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Anindita. (2001). *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Produk PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Yogyakarta Sudirman*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2002). *"Akuntabilitas Instansi Pemerintah"*. Edisi Kedua. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- _____. (2002). *"Sistem Administrasi Keuangan Negara II"*. Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Basri, YZ. Subri, Mulyadi. (2003). *"Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iftina, Faurin. (2002). *Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Kosmetik PT. Lestari Pentakarsa di Tangerang*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. (1988). *"Statistik"*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. (2002). *"Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah"*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamid, Edi Suandi.,et.al. (2004). *"Memperkokoh Otonomi Daerah: kebijakan, evaluasi dan saran"*. Yogyakarta: UII Press.

- Hoesada, Jan. (2004). *Reformasi Akuntansi Kepemerintahan: Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara*. Makalah seminar Indonesian Financial Service Expo 2004. Jakarta.
- Hasan, Iqbal. (2004). *“Analisis data penelitian dengan statistik”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Abdul Gaffar. (2003). *“Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *“Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *“Otonomi dan Pembangunan Daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang”*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. *“Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”*. Jakarta: Depdagri.
- _____. *“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”*. Jakarta: Depdagri.
- _____. *“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”*. Jakarta: Depdagri.
- _____. *“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”*. Jakarta: Depdagri.

- _____. *“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Depdagri.
- Rofiah, Khusniati. (2004). *“Persepsi Konsumen Terhadap Citra BPR Syariah (studi kasus pada BPRS Al-Mabrur, Ponorogo)*. Tesis Magister: UII.
- Simamora, Bilson. (2002). *“Panduan Riset Prilaku Konsumen”*. Jakarta: Gramedia.
- Suharsimi, Arikunto. (1998). *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”* (edisi revisi). Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Sutanta, Hadi. (2005). *“Statistik & probabilitas: teori dan praktek”*. Yogyakarta: Adityamedia.
- Suparmoko. (2003). *“Keuangan Negara (dalam teori dan praktek)”*. Edisi V. Yogyakarta: BPFE.
- Umar, Husein. (2001). *“Riset Akuntansi”*. Jakarta: Gramedia
- Ulum, Ihyaul MD. (2005). *“Akuntansi Sektor Publik (sebuah pengantar)”*. Malang: UMM Press.
- W, Teguh. (2004). *“Cara mudah melakukan statistik dengan SPSS”*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yanto, Sri. (2004). *Meneropong Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara*. Media Akuntansi, vol 39. Jakarta: IAI

LAMPIRAN 1

Daftar Kuesioner

Persepsi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sleman

I. Pertanyaan untuk data umum.

Petunjuk pengisian daftar kuesioner untuk data umum:

Untuk no.2 sampai dengan no. 5 berilah tanda silang (X) pada item jawaban yang anda anggap paling tepat. Khusus no.1 jika anda keberatan mencantumkan nama anda, pertanyaan no.1 boleh tidak dijawab.

1. Nama :

2. Jenis Kelamin

Pria Wanita

3. Pendidikan terakhir

SLTA D3 Sarjana/S1 S2 S3

4. Organisasi

DPRD Akademisi BPK BAPPEDA

LSM KADIN BPKKD BAWASDA

Lainnya, sebutkan.....

5. Masa Kerja

Kurang dari 2 tahun 5 – 7 tahun

3 – 5 tahun Lebih dari 7 tahun

II. Pernyataan untuk data khusus (persepsi)

Petunjuk pengisian daftar kuesioner untuk data khusus:

Isilah pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada kotak jawaban yang anda anggap paling tepat.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pernyataan berikut berkaitan dengan Akuntabilitas Keuangan Pemkab Sleman

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Pemkab Sleman telah melaksanakan prinsip-prinsip Akuntabilitas publik dengan baik				
Secara umum akuntabilitas publik Pemkab Sleman sudah baik				
Secara umum Pemkab Sleman telah melaksanakan prinsip Good Governance dengan baik				

Pernyataan berikut berkaitan dengan Persepsi Transparansi Anggaran Pemkab Sleman

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Saya memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi (mengkritisi, memberi masukan) dalam proses penganggaran APBD				

Anggaran Pemkab Sleman sudah memenuhi prinsip transparansi anggaran				
RAPBD telah dipublikasikan kepada masyarakat luas sebelum disahkan menjadi APBD				
Rancangan anggaran Pemkab Sleman mudah untuk diakses atau dilihat oleh masyarakat luas				
Rancangan Anggaran Pemkab Sleman disusun secara komprehensif, sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat luas				

Pernyataan berikut berkaitan dengan Transparansi Sistem Akuntansi Pemkab Sleman.

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Saya mengetahui dan memahami mengenai sistem akuntansi Pemkab Sleman				
Sistem akuntansi Pemkab Sleman sudah memenuhi prinsip-prinsip sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah				
Sistem akuntansi Pemkab Sleman mengatur secara lengkap mengenai prosedur, dokumen, catatan, sistem otorisasi, dan sistem pelaporan				
Secara umum sistem akuntansi Pemkab Sleman berjalan dengan baik				

Pernyataan berikut berkaitan dengan Transparansi laporan keuangan Pemkab Sleman

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Saya mengetahui dan memahami tentang laporan keuangan Pemkab Sleman				
Laporan keuangan Pemkab Sleman sudah memenuhi prinsip-prinsip pelaporan keuangan pemerintah daerah				
Laporan keuangan Pemkab Sleman dipublikasikan tepat waktu				
Laporan keuangan Pemkab Sleman dapat diandalkan, bebas dari pengertian menyesatkan, disajikan secara wajar dan jujur (<i>faithful representation</i>)				
Laporan keuangan Pemkab Sleman relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dimasa mendatang				

Pernyataan berikut berkaitan dengan Signifikansi pengaruh antara akuntabilitas keuangan Pemkab Sleman dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna secara pribadi atau institusi.

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Laporan akuntabilitas keuangan Pemkab sleman mempunyai manfaat dan berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik				

Saya menggunakan laporan akuntabilitas keuangan Pemkab Sleman dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial atau politik				
Saya mengikuti perkembangan akuntabilitas keuangan Pemkab Sleman				
Saya menunggu laporan akuntabilitas keuangan Pemkab Sleman sebelum mengambil keputusan ekonomi, sosial atau politik				

LAMPIRAN 2

Data Nilai Jawaban Kuesioner

No. Resp	Akuntabilitas			Transp.Anggaran					Transp.Sistem					Transp.Lap.Keuangan					Sign.Akunt. dan Kep.				
	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
1	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	
2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4
3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2
5	4	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3
6	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	2	2	2
8	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
12	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
13	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3
15	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2	2
16	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	3
17	2	2	1	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	3
18	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	3	3
19	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
20	3	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	4	4
21	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4
24	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2
27	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
31	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	1	3	3	3	2	3	2
32	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Data Nilai Jawaban Kuesioner

No.	Akuntabilitas			Transp.Anggaran					Transp.Sistem					Transp.Lap.Keuangan					Sign.Akunt. dan Kep.				
	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
Resp																							
34	3	3	3	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
36	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
37	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
40	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	2
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
42	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
43	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	1	3	3	3	3	3	2	2
44	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3
46	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
48	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
51	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2
53	4	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
55	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	2	2	2	2	4
56	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
57	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3
58	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2
60	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2
61	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
64	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	2	2
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
66	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Data Nilai Jawaban Kuesioner

No.	Akuntabilitas			Transp.Anggaran					Transp.Sistem					Transp.Lap.Keuangan					Sign.Akunt. dan Kep.				
	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
Resp																							
67	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	1	3	3	3	3	3	4	3
68	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
71	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	2
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
75	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	2
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
77	3	3	3	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
78	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2
79	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2
80	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
82	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
83	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
85	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
87	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
88	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	1	3	3	3	3	3	4	3
89	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	4	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
90	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	4	3
91	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
92	3	3	3	3	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2
93	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
94	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
97	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3

Data Nilai Jawaban Kuesioner

No. Resp	Akuntabilitas			Transp.Anggaran					Transp.Sistem					Transp.Lap.Keuangan					Sign.Akunt. dan Kcp.				
	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
133	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
134	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
135	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
136	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
137	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
138	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
140	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
141	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
143	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
145	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
146	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
147	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
148	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
149	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
150	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
151	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
152	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
153	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
154	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
155	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
156	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
157	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Reliability

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	AKUNT1	2.8333	.5307	30.0
2.	AKUNT2	2.9000	.5477	30.0
3.	AKUNT3	2.8667	.6288	30.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	8.6000	2.5241	1.5888	3

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
AKUNT1	5.7667	1.2885	.7919	.9206
AKUNT2	5.7000	1.1828	.8741	.8552
AKUNT3	5.7333	1.0299	.8610	.8705

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0

N of Items = 3

Alpha = .9194

Reliability

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	TRANAG1	2.9667	.6149	30.0
2.	TRANAG2	2.5000	.6823	30.0
3.	TRANAG3	2.4333	.6789	30.0
4.	TRANAG4	2.4000	.6747	30.0
5.	TRANAG5	2.5667	.6789	30.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	12.8667	8.4644	2.9094	5

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
TRANAG1	9.9000	6.7138	.4307	.9674
TRANAG2	10.3667	5.2057	.8971	.8838
TRANAG3	10.4333	5.2195	.8974	.8833
TRANAG4	10.4667	5.2230	.9035	.8826
TRANAG5	10.3000	5.2517	.8843	.8866

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0

N of Items = 5

Alpha = .9221

Reliability

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	TRANSI1	2.4828	.5745	29.0
2.	TRANSI2	2.3793	.5615	29.0
3.	TRANSI3	2.4138	.6278	29.0
4.	TRANSI4	2.4828	.6336	29.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	9.7586	5.2611	2.2937	4

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
TRANSI1	7.2759	3.1355	.8825	.9686
TRANSI2	7.3793	3.1010	.9329	.9555
TRANSI3	7.3448	2.8768	.9345	.9542
TRANSI4	7.2759	2.8498	.9395	.9529

Reliability Coefficients

N of Cases = 29.0

N of Items = 4

Alpha = .9682

Reliability

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	TRANLAP1	2.9310	.5935	29.0
2.	TRANLAP2	2.7586	.6356	29.0
3.	TRANLAP3	2.7931	.5593	29.0
4.	TRANLAP4	2.7241	.5914	29.0
5.	TRANLAP5	2.7931	.6199	29.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	14.0000	7.7857	2.7903	5

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
TRANLAP1	11.0690	5.2094	.8210	.9620
TRANLAP2	11.2414	4.9039	.8803	.9530
TRANLAP3	11.2069	5.2414	.8714	.9513
TRANLAP4	11.2759	4.9926	.9245	.9452
TRANLAP5	11.2069	4.8128	.9518	.9403

Reliability Coefficients

N of Cases = 29.0

N of Items = 5

Alpha = .9605

Reliability

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	SIGNIF1	3.2759	.5914	29.0
2.	SIGNIF2	2.0000	.4629	29.0
3.	SIGNIF3	2.7241	.7510	29.0
4.	SIGNIF4	1.9310	.3714	29.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	9.9310	2.1379	1.4622	4

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
SIGNIF1	6.6552	1.3054	.3572	.4472
SIGNIF2	7.9310	1.4951	.3786	.4443
SIGNIF3	7.2069	1.0271	.3592	.4743
SIGNIF4	8.0000	1.7143	.2938	.5129

Reliability Coefficients

N of Cases = 29.0

N of Items = 4

Alpha = .5438

NPar Tests

LAMPIRAN 4

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
prinsip akuntabilitas	157	3,0318	,57088
akuntabilitas scr umum	157	2,9682	,45882
good governance	157	2,9108	,48537

Descriptive Statistics

	Minimum	Maximum
prinsip akuntabilitas	2,00	4,00
akuntabilitas scr umum	2,00	4,00
good governance	1,00	4,00

Friedman Test

Ranks

	Mean Rank
prinsip akuntabilitas	2,09
akuntabilitas scr umum	2,00
good governance	1,91

Test Statistics^a

N	157
Chi-Square	10,840
df	2
Asymp. Sig.	,004

a. Friedman Test

T-Test

Group Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
prinsip akuntabilitas				
institusi	92	3,2283	,44729	,04663
internal	65	2,7538	,61316	,07605
akuntabilitas secara umum				
internal	92	3,0870	,31976	,03334
eksternal	65	2,8000	,56458	,07003
good governance				
internal	92	3,0435	,29326	,03057
eksternal	65	2,7231	,62519	,07755

Independent Samples Test

	t-test for Equality of Means			
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
prinsip akuntabilitas	5,607	155	,014	,47441
	5,318	110,215	,013	,47441
akuntabilitas scr umum	4,046	155	,016	,28696
	3,700	92,939	,014	,28696
good governance	4,296	155	,020	,32040
	3,844	84,017	,018	,32040

LAMPIRAN 5

Pengujian *friedman test* pada hipotesis pertama (H_1)

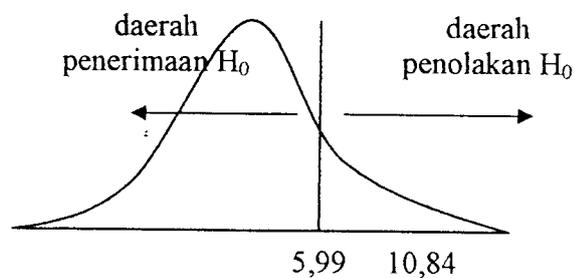
1. H_0 = Tidak terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

H_a = Terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman

2. x^2 tabel (0,05 : 2) = 5,99

3. x^2 hitung = 10,84

4. x^2 hitung \geq x^2 tabel



5. Kesimpulan: H_0 ditolak atau H_1 diterima, berarti terdapat perbedaan persepsi diantara para pengguna laporan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Sleman mengenai akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Regression

LAMPIRAN 6

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pengambilan keputusan	3,0271	,33800	157
publikasi laporan keuangan	2,8357	,35482	157

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	publikasi laporan keuangan ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: pengambilan keputusan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,821 ^a	,744	,713	,33394

Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,744	4,818	1	155	,030

a. Predictors: (Constant), publikasi laporan keuangan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square
1	Regression	,537	1	,537
	Residual	17,285	155	,112
	Total	17,822	156	

ANOVA^b

Model		F	Sig.
1	Regression	4,818	,030 ^a
	Residual		
	Total		

a. Predictors: (Constant), publikasi laporan keuangan

b. Dependent Variable: pengambilan keputusan

Coefficients^a

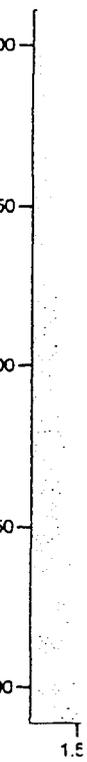
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2,558	,215	
	publikasi laporan keuangan	,165	,075	,174

h

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	11,880	,002
	publikasi laporan keuangan	2,195	,030

a. Dependent Variable: pengambilan keputusan





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/1036 / 2005.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Dekan, u.b. Pembantu dekan I, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor: 260/PD.I/10/Bag.Um/V/2005 Tanggal: 27 Mei 2005 Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **NANDA FIRMAN MAULANA**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 00312059
Program/ Tingkat : **SI**
Instansi/Perguruan Tinggi : **U I I Yogyakarta**
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : **Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta**
Alamat Rumah : **Jl. Pogung Baru 168 Sleman, Yogyakarta**
Untuk : **Mengadakan Penelitian dengan Judul :
"PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN"**
Lokasi : **Bappeda, BPKKD, Bawasda, DPRD Kab. Sleman**
Waktu : **Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 13 Juni 2005 s.d
13 September 2005.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 13 Juni 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (Sebagai Laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Setwan DPRD Kab. Sleman
4. Ka. BPKKD Kab. Sleman
5. Ka. Bawasda Kab. Sleman
6. Sekretaris Bappeda Kab. Sleman
7. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
8. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub Bid. Data & Informasi

Dra. Hj. Sri Subekti Handayani
NIP. 010 253 131



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 212/DEK/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

02 Mei 2005

Kepada Yth.
Pemerintah Kabupaten Sleman
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Pawiro Kuwat 187 B Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Dosen Pembimbing : Drs. Mahmudi, M.Si

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

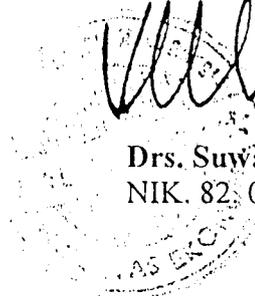
Atas perkenan dan bantuan Saudara , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumw wr. wb

Dekan,



Drs. Suwarsono Muhammad, MA
NIK. 82.048





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 261/DEK/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

30 Mei 2005

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Sleman

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Pogung Baru No. 168 Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dekan,

Drs. Suwarsono Muhammad, MA
NIK. 82. 048



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 261/DEK/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

30 Mei 2005

Kepada Yth.
Pimpinan BAWASDA
Sleman

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Pogung Baru No. 168 Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'a'aikum wr. wb

Dekan,

Drs. Suwirsono Muhammad, MA
NIK 082.048



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 267/DEK/10/Bag.Um/VI/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

3 Juni 2005

Kepada Yth.
Pimpinan BPKKD
Kabupaten Sleman
Yogyakarta

Assalamu 'a'aikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : C0312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Fogung Baru No. 168 Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE, M.Si, Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb



[Signature]
Drs. Suwarsono Muhammad, MA
NIK.: 82.048



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 267/DEK/10/Bag.Um/VI/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

3 Juni 2005

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Kabupaten Sleman
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Pogung Baru No. 168 Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE, M.Si, Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan,

Drs. Suwarsono Muhammad, MA
NIK.: 82. 048



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 212/DEK/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

02 Mei 2005

Kepada Yth.
Ketua LSM IMPRESS
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Pawiro Kuwat 187 B Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Dosen Pembimbing : Drs. Mahmudi, M.Si

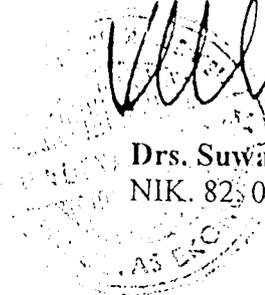
Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Drs. Suwārsono Muhammad, MA
NIK. 82.048





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 260/PD.I/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

27 Mei 2005

Kepada Yth.
Ketua LSM IRE
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Pogung baruNo. 168 Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

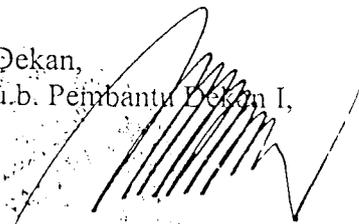
Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE, M.Si, Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dekan,
u.b. Pembantu Dekan I,


Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak.
NIP.: 131.628.661



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 261/DEK/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

30 Mei 2005

Kepada Yth.
Ketua KPUD
Sleman

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : 00312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Pogung Baru No. 168 Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Dekan,

Drs. Suwarsono Muhammad, MA
NIK 82.048



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 260/PD.I/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

27 Mei 2005

Kepada Yth.
Ketua Forum LSM
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri perdidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nanda Firman Maulana
No. Mahasiswa : C0312059
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Fogung baru No. 168 Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : PERSEPSI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

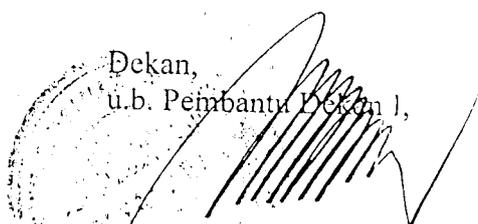
Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE, M.Si, Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dekan,
u.b. Pembantu Dekan I,


Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak.
NIP. : 131.628.661